

BRAFOPMK

BERITA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

LEKSIKON

PERISTIWA
SEJARAH
INDONESIA
DI BULAN
MARET



Ende,
SEJARAH
PANCASILA
DAN INDAHNYA
KELIMUTU

Menko PMK :

Utamakan Tenaga Kerja dan Merek Indonesia

Dunia usaha diminta untuk menggunakan tenaga kerja Indonesia dan bermerek Indonesia. Dengan begitu, rasa nasionalisme akan terbentuk.

12 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

CSR PENTING BAGI
PROGRAM KEMISKINAN

20 IPTEK

SEDAPNYA KECAP
DARI AIR KELAPA

36 EKONOMI

BANYAK HARAPAN,
BANYAK CARA



SURAT PEMBACA

PETANI MASIH BUTUH PERHATIAN

Beberapa pekan terakhir, melambungnya harga beras menjadi berita yang hangat di masyarakat. Kenaikan harga beras dianggap sebuah ironi di tengah keputusan pemerintah yang menurunkan harga BBM. Meski harga BBM sudah turun toh nyatanya harga beras masih tetap tinggi.

Kenaikan harga beras sebenarnya cukup menjadi angin segar bagi para petani agar hasil yang diperoleh saat panen juga meningkat. Terlebih lagi, Pemerintah sepakat menaikkan harga pokok pembelian (HPP) beras pada tahun ini sebesar 10% dari HPP dari yang berlaku saat ini.

Meskipun demikian, kondisi tersebut sejatinya belum berpengaruh signifikan bagi peningkatan kesejahteraan petani. Mengutip pernyataan pengamat pertanian Khudori, kenaikan HPP sekitar 10% dinilai tak akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Ini karena kenaikan itu tidak sebanding dengan kenaikan inflasi yang terjadi selama dua tahun terakhir dan beberapa ongkos produksi. Belum lagi ketersediaan lahan dan produktivitas pertanian yang semakin menyempit.

Untuk itu sebagai petani, kami berharap pemerintah lebih peduli

lagi terhadap sektor pertanian. Sebab pada kenyataannya HPP kerap kali tak bisa dijadikan patokan akan peningkatkan kesejahteraan petani. Sebab selain biaya produksi yang terus meningkat, sempitnya lahan pertanian, terkadang para tengkulak juga kerap 'bermain' harga saat masa panen.

M. Shokhib
Ujungpangkah, Gresik, Jatim



Redaksi BRAFO PMK menerima kiriman naskah atau artikel terkait pendidikan, pembangunan daerah dibidang kesehatan dan kesejahteraan. Naskah bisa dikirim dalam bentuk ms.word ke: brafopmk@kemenkopmk.go.id.

DAFTAR ISI

EDITORIAL	3
FOKUS UTAMA	
MENKO PMK :	
UTAMAKAN TENAGA KERJA	
DAN MEREK INDONESIA	4
TKA BERKURANG,	
PELUANG BAGI PEKERJA LOKAL	6
MEREK DAN NASIONALISME	8
EMPAT MENKO DAN DPR	
BAHAS APBN-P 2015	10
CSR PENTING	
BAGI PROGRAM KEMISKINAN	12
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	12
KESEHATAN	14
PUSTAKA	16
PENDIDIKAN	18
IPTEK	20
OPINI	22
SUARA DAERAH	24
BUDAYA	26

WISATA	29
PRODUK HUKUM	32
EKONOMI	36
INTERNASIONAL	38
PEREMPUAN & ANAK	40
REFORMASI BIROKRASI	42
UMKM	44
LINGKUNGAN	46
LEKSIKON	48
BERITA FOTO	50



Menko PMK Puan Maharani menghadiri Rapat Paripurna Tingkat Menteri tentang pengelolaan perbatasan dan rencana penarikan kewenangan terkait Flight Information Region (FIR), Di Kantor Kementerian Polhukam, Jakarta.

Brafo PMK diterbitkan oleh
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia

Pembina:

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia

Pengarah:

Para Deputi Menko PMK
Para Staf Ahli Menko PMK

Penanggung Jawab:

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
PMK Republik Indonesia

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:

Kepala Biro Informasi dan Persidangan

Redaktur Pelaksana:

Kabag Humas dan Dokumentasi
Ponco Suharyanto, S.Sos

Staf Redaksi:

M. Shokhiyan, S.S
Siti Badriah, S.S

Ahli Tata Letak/Produksi:

Kristian Suryatna, A.Md. Graf

Sirkulasi:

Abdul Kohar

Sekretaris:

Nurseha Saputra, A.Md

Sekretariat Redaksi:

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta 10110
Telp./ Faks. (021) 386 0565, (021) 385 2165
Email: brafopmk@kemenkopmk.go.id
Situs: www.kemenkopmk.go.id

Penerbit:

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Redaksi menerima artikel
atau tulisan juga foto.

Redaksi berhak mengubah tulisan sepanjang
tidak mengubah isi dan maknanya.

MEMPRODUKSI DAN MENCINTAI

Korea dan Jepang adalah salah satu contoh negara yang sukses mengembangkan produk dalam negeri dan berhasil menembus pasar internasional tanpa melupakan akar budaya bangsa. Ya, mereka tetap menggunakan nama nasionalnya bukan menyesuaikan selera internasional untuk setiap produknya. Sebut saja Hyundai, Samsung hingga Yamaha. Menyebut nama-nama itu kita sudah langsung membayangkan negara asalnya. Otomatis, nama produk itu ikut mengenalkan negara yang bersangkutan.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Bisakah kita mengejar prestasi seperti Korea dan Jepang yang sukses mengembangkan produk dalam negeri dan berhasil menembus pasar internasional tanpa melupakan akar budaya bangsa. Jawabannya harus bisa. Kita memiliki banyak potensi dibandingkan kedua negara tadi. Diantara potensi itu ialah keragaman budaya serta sumber daya alam Indonesia yang cukup melimpah. Kita, perlu menyadari hal tersebut dan segera memanfaatkannya demi kemajuan ekonomi.

Yang tak kalah pentingnya, bangsa ini juga harus memiliki kebanggaan akan produk lokal dengan cara membelinya. Hal itu akan sangat membantu perkembangan produk lokal. Ini penting mengingat di akhir tahun 2015 akan diberlakukan

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sebagai informasi dengan 200 juta penduduknya, Indonesia merupakan konsumen terbesar di ASEAN dan ke-4 di dunia setelah China, India dan Amerika. Dan disaat yang sama, tentu produk-produk dari negara ASEAN bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat. Kita sendiri tak perlu khawatir akan pemberlakuan MEA tersebut. Sebaliknya itu merupakan kesempatan untuk mengenalkan dan memasarkan produk-produk bangsa ini.

Dengan 200 juta penduduknya pula Indonesia perlu membangkitkan

jiwa wirausaha warganya. Sebagai gambaran, Indonesia baru mempunyai 1,65% wirausaha dari jumlah populasi penduduk Indonesia. Padahal sejatinya,

sebuah negara mesti memiliki minimal 2% wirausaha dari total penduduknya untuk menjadi negara yang maju. Sebagai perbandingan, Amerika misalnya memiliki 11,5% wirausaha. Bahkan Jiran kita, Singapura mempunyai 7,2% dan Malaysia terdapat 3% wirausahawan. Karenanya pemerintah juga dirasa perlu untuk memberikan pelatihan wirausaha bagi kalangan pemuda, khususnya mereka yang masih menganggur. Termasuk memberikan bantuan atau kemudahan kredit sebagai modal usaha. Korea dan Jepang memulainya dari situ, yang kemudian mencintai produk sendiri dengan membelinya serta memasarkannya di dunia internasional.



Menko PMK :

Utamakan Tenaga Kerja dan Merek Indonesia

Dunia usaha diminta untuk menggunakan tenaga kerja Indonesia dan bermerek Indonesia. Dengan begitu, rasa nasionalisme akan terbentuk.

Dalam kunjungannya ke PT Sritex, di Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menegaskan eksistensi PT Sritex tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Sukoharjo saja. Lebih dari itu, bangsa Indonesia pun sangat berbangga akan produk tekstilnya yang digunakan di seluruh dunia. Selain hasil penjualan produk tekstilnya mendatangkan devisa bagi Negara, PT Sritex pun mampu mengenalkan Indonesia di kancah Internasional. "PT Sritex juga bisa membantu pemerintah dibidang pengentasan pengangguran karena banyak menyerap tenaga kerja," kata Menko PMK.

Karenanya ia berpesan agar PT Sritex lebih mengutamakan warga sekitar dan anak negeri yang tersebar diberbagai pelosok Indonesia untuk kebutuhan tenaga kerja. Tenaga kerja lokal menurutnya tak kalah dibandingkan tenaga kerja asing. "Tenaga kerja lokal tinggal diberi

kesempatan bekerja karena mereka sudah punya bekal kemampuan," cetusnya. Memang selama ini beberapa kendala yang dihadapi dari beberapa perusahaan adalah SDM, oleh sebab itu diharapkan pemakaian tenaga kerja asing hendaknya diikuti dengan alih teknologi kepada tenaga kerja bangsa kita.

"Saya harap, keberadaan PT Sritex mampu mendukung ekonomi di Sukoharjo. Untuk itu, pemerintah harus selalu mendorong dunia industri agar terus berkembang," tandasnya. Khusus intuk pemenuhan tenaga kerja di dunia industri, Menko PMK mengatakan yang dibutuhkan saat ini dalam jumlah banyak adalah tenaga operator industri. Karenanya, sekolah, khususnya SMK, diharapkan mampu menyediakan lulusan yang siap terjun ke dunia industri.

Disamping memenuhi tenaga kerja asli dari Indonesia, Menko PMK meminta agar PT Sritex mencantumkan identitas Indonesia dalam setiap produk yang diekspor. "Terus gunakan nama Indonesia. Kalau merek apa terserah, tapi 'made in' harus Indonesia. Kalau



saya menemukan ada produk merek internasional, tapi 'made in' Indonesia, saya bangga," tegasnya.

Disebutkannya, industri nasional yang namanya sudah mendunia memiliki tanggungjawab untuk membawa dan mengenalkan nama Indonesia ke dunia internasional lewat produk-produk yang dihasilkan. "Rasa nasionalisme harus dibangun oleh setiap manusia yang mengatasmakan dirinya sebagai Warga Negara Indonesia," imbuhnya. Menko PMK juga menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang memberikan peluang kesejahteraan bagi tenaga kerjanya wajib didorong. Ini sesuai dengan tekad pemerintahan Joko Widodo-Jusuf



Kalla untuk membuka infrastruktur di segala bidang.

Menko PMK sendiri pada kesempatan itu meletakkan batu pertama perluasan pabrik tekstil Sritex di Sukoharjo, Jateng. Menko PMK juga berkesempatan menanam pohon Sawo Kecil di kawasan industri tersebut sebagai symbol bahwa kegiatan industri haruslah bersifat berkelanjutan dan ramah terhadap lingkungan.

Sebagai informasi, perluasan pabrik PT Sritex ini mencakup 5 hektare (Ha) lahan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Pabrik yang ditargetkan dapat dioperasikan pada 2016 mendatang itu telah dimulai pembangunannya

pada Februari lalu. Pabrik baru tersebut akan digunakan untuk spinning atau pemintalan benang dan finishing atau tahap akhir produk tekstil. Unit tersebut ditargetkan akan mampu menyerap 3.000 tenaga kerja. Perluasan pabrik untuk meningkatkan kapasitas produksi pemintalan benang, penenunan, dan garmen. Sritex menargetkan dengan penambahan pabrik produksi benang meningkat menjadi 15 juta meter/bulan dari sebelumnya 10 juta meter/bulan. Dari sektor penenunan ditargetkan meningkat menjadi 20 juta yard/bulan dari sebelumnya 10 juta yard/bulan. Sedangkan produksi garmen ditargetkan meningkat menjadi 5 juta potong pakaian jadi/

bulan dari sebelumnya kurang dari 4 juta potong pakaian jadi/bulan.

Sritex selama ini sudah berhasil merebut pangsa pasar di seluruh Indonesia dan lebih dari 100 negara di dunia. Peluang perluasan pasar di negara lain bagi perusahaan ini sangat terbuka. Pasalnya industri tekstil di Indonesia baru dapat meraih 2 persen pasar dunia. Selama ini PT Sritex terus mengembangkan produk, terutama produk ragam tekstil di bidang pertahanan dan fashion. Pada sektor tekstil bidang pertahanan, Sritex mengembangkan seragam militer antiapi, antiinfra merah, antiserangga, rompi antipeluru, dan tenda. Selain itu, dikembangkan pula produk serat rayon dan jaringan retail pakaian jadi. Sampai saat ini PT Sritex juga telah mampu menyerap pekerja sebanyak 3,5 persen tenaga kerja Indonesia.

Selain Menko PMK, perluasan PT Sritex juga dihadiri oleh Menteri Perindustrian Saleh Husein, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rusdi Kirana, Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, Presiden Direktur PT Sritex Tbk Iwan Setiawan Lukminto, pimpinan Pemerintah dan DPRD Jawa Tengah serta unsur TNI dan Polri. **PS/ dbs**



TKA Berkurang, Peluang Bagi Pekerja Lokal

Setiap tahunnya, jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia semakin menurun. Peluang bagi pekerja lokal untuk merebut posisi yang ditinggalkan TKA pun semakin terbuka. Apalagi disaat yang sama pemerintah menargetkan menciptakan kesempatan kerja sebanyak 220.000 orang untuk 1% pertumbuhan ekonomi pada tahun ini.

Data pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jumlah TKA di Indonesia semakin menurun tiap tahunnya. Sebagai gambaran, pada tahun 2013 saja, tercatat sebanyak 68.957 orang TKA di Indonesia. Jumlah tersebut menurun sebesar 5 persen kalau dibandingkan dengan tahun 2012 yang sejumlah 72.427 orang TKA. Jumlah itu pun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2011 dimana terdapat

77.307 TKA.

Di Indonesia sendiri jumlah TKA yang paling mendominasi berasal dari Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India serta Malaysia. Pada 2013 saja jumlah TKA dari Tiongkok sebanyak 14.371 orang, Jepang 11.081 orang, Korea Selatan 9.075 orang, India 6.047 orang serta Malaysia 4.962 orang. Banyak dari mereka yang berposisi sebagai level profesional, advice/consultant, manager, direksi, supervisor, teknisi dan komisaris. Para TKA tersebut juga banyak yang membidik sektor

perdagangan dan jasa sebagai pekerjaan favorit. Termasuk sektor industri dan pertanian.

Menurunnya jumlah TKA di Indonesia disebabkan oleh banyak hal. Yang utama ialah naik turunnya nilai investasi serta laju perekonomian Indonesia pada beberapa tahun terakhir. Kemudian adanya kebijakan diperketatnya syarat masuk TKA ke Indonesia. Penurunan jumlah TKA itu bukan berarti tidak berdampak sama sekali bagi dunia kerja di Indonesia. Dari sisi pendapatan negara,

berkurangnya TKA berarti juga penerimaan pajak dari para TKA ikut menurun.

Walau begitu berkurangnya TKA juga telah membuka peluang bagi tenaga kerja Indonesia yang berkompeten untuk maju mengisi posisi TKA yang sering kali menduduki level professional. Pemerintah sendiri masih membuka peluang TKA untuk bekerja di Indonesia dengan catatan mau mengembangkan SDM di Indonesia. Dengan kata lain, para TKA itu harus memberikan kemajuan bagi pengembangan kualitas tenaga kerja dan SDM Indonesia yaitu dengan cara alih keterampilan dan alih teknologi.

Momen berkurangnya TKA harusnya bisa dimanfaatkan oleh para pencari kerja professional pribumi untuk bekerja di negeri sendiri sekaligus memajukan bangsa. Disaat yang sama pemerintah pun mesti meningkatkan mutu SDM lokal agar setingkat dengan para TKA. Ini penting mengingat pemerintah sendiri menargetkan menciptakan

kesempatan kerja sebanyak 220.000 orang untuk 1% pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015. Banyaknya investasi yang harus masuk ke dalam negeri menjadi poin tersendiri untuk target itu.

Pemerintah kini sangat aktif mendorong dua sektor secara maksimal. Sektor itu adalah infrastruktur dan industri manufaktur. Untuk infrastruktur seperti pembangunan jalan dan jembatan mengandalkan dari belanja negara pemerintah. Adapun untuk industri manufaktur, diharapkan dari pihak swasta. Namun semua itu bisa berhasil berkat pajak yang dibayarkan masyarakat untuk negara.

Sebagai informasi, pada Agustus 2014, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data jumlah penganggur terbuka sebanyak 7,24 juta orang atau sekitar 5,94 %. Angka ini meningkat dibandingkan Februari 2014 dimana jumlah penganggur terbuka hanya 7,15 juta orang atau sekitar 5,70%. Dari masa ke masa, penurunan angka penganggur menjadi salah satu pekerjaan

rumah pemerintah. Pemerintahan saat ini pun tengah melakukan pengembangan program padat karya berbasis sumber daya lokal guna menurunkan angka pengangguran pada tahun 2015.

Pemerintah pusat bersama daerah, serta para pelaku usaha dan kelompok masyarakat diharapkan dapat mensinergikan program-program perluasan kesempatan kerja yang nantinya dapat memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Paling tidak terdapat lima pilar utama program perluasan dan penciptaan lapangan kerja pemerintah yang dimaksudkan untuk penanggulangan pengangguran dan kemiskinan. Lima pilar tersebut ialah perbaikan layanan dan sistem informasi ketenagakerjaan, peningkatan keterampilan dan kapasitas pekerja, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah serta kewirausahaan, peningkatan pembangunan infrastruktur berbasis komunitas serta program darurat ketenagakerjaan. *PS/ dbs*



Merek dan Nasionalisme

Ajakan penggunaan merek bernama Indonesia bukan tanpa alasan. Selain membangkitkan nasionalisme, merek sebuah produk juga mampu mengenalkan negaranya ke dunia internasional.



Terkait merek yang menggambarkan negara asal atau bernama asli negara yang memproduksi suatu barang, Indonesia bisa belajar dari kesuksesan Jepang maupun Korea. Siapa yang tidak kenal dengan merek Toyota untuk menyebut sebuah mobil Jepang atau Samsung untuk perangkat elektronik dari Korea? Diluar itu masih ada merek dari dua negara tersebut yang mendunia dan menggunakan nama asli atau berasal

dari bahasa negaranya.

Percaya atau tidak, untuk menuju kesana, pemerintah kedua negara itu sudah merencanakannya jauh-jauh hari. Artinya ada keterlibatan pemerintah. Jepang misalnya, walau Toyota identik dengan perusahaan swasta, tetapi keterlibatan pemerintah dalam mengembangkannya ikut dirasakan. Peran pemerintah misalnya dapat dilihat dalam mengatasi depresi ekonomi serta menolong munculnya

industry baru. Dan yang tak kalah penting ialah membangkitkan merek-merek lokal untuk berkibar pada pasar lokal namun juga internasional. Saking kuatnya pengaruh pemerintah, maka sebutan 'Japan Inc' lahir sebagai gambaran harmonisnya kalangan bisnis dan pemerintah.

Setali tiga uang dengan Jepang, Korea pun demikian. Sejak era 1980-an, negara ginseng ini mengedepankan nasionalisme

konsumen. Walau merek internasional menyerbu pasar Korea, masyarakatnya ternyata lebih memilih produk dalam negeri meski kualitas merek lokal masih sangat buruk serta tertinggal. Mereka lebih bangga menggunakan produk lokal dibandingkan asing yang identik dengan produk penjajah. Di kepala mereka, dengan membeli produk lokal berarti ada kesempatan untuk tumbuh kembang bersama.

Sebagai awalan, langkah kedua negara untuk memunculkan produk lokal ke pasar internasional memang dirasa berat. Namun perlahan tapi pasti, produk lokal mereka kini pun telah mendunia tanpa menggunakan merek berbau asing. Langkah mereka cenderung sama dengan strategi pemerintah yang jelas, komitmen meningkatkan kualitas serta kebanggaan menggunakan produk nasional.

Cara tersebut kemudian coba diadopsi oleh Vietnam yang lebih dulu memacu berkibarnya merek lokal di pasar dalam negeri. Vietnam misalnya, juga sudah mendirikan Dewan Merek Nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Hingga kini Dewan itu telah menghasilkan beberapa kebijakan revolusioner yang diantaranya, Program Merek Nasional, yang dimaksudkan untuk mempromosikan serta mencitrakan produk-produk negeri bekas jajahan Amerika itu.

Nah, ajakan Menko PMK Puan Maharani yang meminta agar PT Sritex mencantumkan identitas Indonesia dalam setiap produk yang diekspor sudah tepat. Puan ketika itu berpesan agar Sritex terus menggunakan nama Indonesia. “Kalau merek apa terserah, tapi ‘made in’ harus Indonesia. Kalau saya menemukan ada produk merek internasional, tapi ‘made in’ Indonesia, saya bangga,” ujarnya. Ditegaskannya, industri nasional



yang namanya sudah mendunia memiliki tanggungjawab untuk membawa dan mengenalkan nama Indonesia ke dunia internasional lewat produk-produk yang dihasilkan. “Rasa nasionalisme harus dibangun oleh setiap manusia yang mengatasnamakan dirinya sebagai Warga Negara Indonesia,” cetusnya.

Harapan ini dirasa tidak muluk. Apalagi produk tekstil Indonesia sudah demikian mendunia. Dan permintaan akan produk tekstil Indonesia dari pasar Internasional pun termasuk cukup tinggi saat ini. Karenanya Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia pun siap melakukan ekspor atau menerobos pasar Uni Eropa (EU), jika kesepakatan perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) ke kawasan tersebut dibuka oleh Pemerintah Indonesia dan kawasan. “Kami siap dengan target

ekspor yang dibuat pemerintah sebanyak tiga kali lipat pada akhir 2019, asal FTA dengan EU dan Turki segera dilakukan,” ujar Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat seperti dikutip dari Antara. Dikatakannya, ekspor produk tekstil ke EU saat ini baru mencapai 3,6 miliar dollar AS dengan tarif 12 persen hingga 30 persen, sedangkan jika FTA diberlakukan, maka peningkatan ekspor bisa mencapai 10 miliar dollar AS hingga 12 miliar dollar AS. Menurutnya, EU merupakan pasar yang potensial dengan 250 juta penduduk, income per kapita sebesar 40 ribu dollar AS dan tingkat konsumsi mendekati 28 kilogram per kapita, yang berarti memiliki daya beli yang kuat. Industri TPT, jelasnya, kini terus bersiap diri sambil menunggu saatnya Indonesia membuka FTA dengan pasar EU dan Turki. **PS/dba**



Empat Menko dan DPR Bahas APBN-P 2015

Empat Menko rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional – Perubahan (APBN-P) 2015. APBN-P 2015 diharapkan bermanfaat bagi rakyat.

Gedung DPR RI kedatangan empat Menko. Hari itu di awal Februari mereka serempak hadir guna membahas APBN-P 2015 bersama anggota dewan. Keempat Menko tersebut adalah, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menko Perekonomian Sofyan Djalil serta Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno.

Kepada awak media, Menko PMK Puan Maharani menyebut kehadiran para menteri koordinator dalam rapat konsultasi ini untuk menyinkronkan program-program pemerintah. "Jadi, dengan forum ini eksekutif dan legislatif dapat bersilaturahmi sehingga tidak ada hal-hal yang membuat miskomunikasi antara legislatif dan eksekutif," ujarnya. Dijelaskannya, rapat konsultasi yang juga konvensi silaturahmi ini diharapkan untuk bisa dilanjutkan dalam hal-hal yang lebih spesifik, sehingga koordinasi kementerian di Kemenko bisa terkoordinasi dengan baik.

Sementara, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan rapat konsultasi itu adalah inisiatif pimpinan DPR terkait APBNP 2015 dan akan diteruskan dalam rapat Banggar. "Penjelasan program pemerintah telah ditanggapi oleh pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan pimpinan Banggar, di mana DPR akan mendukung program pembangunan yang berpihak kepada rakyat," katanya. Setya menambahkan, pembahasan secara rinci tentu akan ditindaklanjuti oleh DPR RI. Pihaknya sendiri mengapresiasi program-program kementerian di bawah 4 Kemenko tersebut, karena memberikan harapan kepada rakyat.

"Semua program memberi harapan untuk rakyat. Para Menko telah memberikan hal-hal terbaik dengan memberikan program, sehingga pimpinan fraksi dan komisi

memberi apresiasi yang besar ke Menko karena penjelasannya rinci dan detail," imbuhnya. Sebelumnya, jelas Setya, pihaknya telah menyampaikan kepada Presiden bahwa rapat ini sangat penting untuk DPR karena APBN-P mesti dibahas dan diselesaikan dalam waktu cepat. "Kita harapkan dalam jangka waktu sidang ini (APBN-P) ini selesai dibahas dengan baik bersama-sama," cetusnya.

Disamping membahas APBN-P DPR dengan keempat Menko itu juga berkoordinasi soal nomenklatur sejumlah kementerian di kabinet yang berubah. Rapat yang dipimpin Ketua DPR Setya Novanto itu juga dihadiri oleh pimpinan DPR lainnya yaitu Taufik Kurniawan, Fahri Hamzah, Fadli Zon, dan Agus Hermanto. Pimpinan fraksi, komisi, dan Badan Anggaran juga hadir.

HASILNYA

Hasil dari rapat itu sendiri menyepakati pagu anggaran empat kementerian koordinator di RAPBN-P 2015 yang akan dimanfaatkan untuk keperluan kegiatan operasional. Rapat telah memutuskan Kemenko Pembangunan Manusia dan Pembangunan mendapatkan dana sesuai pengajuan dalam RAPBN-P 2015 yakni Rp444,84 miliar dan memperoleh tambahan Rp149 miliar dari realokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), dari alokasi awal APBN sebesar Rp295,8 miliar.

Kemenko Perekonomian ikut mendapatkan dana tambahan realokasi BA BUN sebesar Rp20,8 miliar, sehingga alokasinya meningkat dari pagu APBN sebesar Rp305,9 miliar menjadi Rp326,68 miliar dalam RAPBN-P 2015. Kemenko Kemaritiman memperoleh dana tambahan yang diusulkan sebesar Rp125 miliar, sehingga dana untuk operasional total dalam RAPBN-P 2015 mencapai Rp200 miliar.

Sebelumnya, Kemenko Kemaritiman memperoleh anggaran realokasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp75 miliar di APBN.

Kemenko Polhukam hanya mendapatkan tambahan dana Rp70 miliar dari realokasi BA BUN, sehingga total mendapatkan anggaran sebesar Rp519,5 miliar dalam RAPBN-P 2015 dari alokasi APBN sebesar Rp449,6 miliar. Dalam kesempatan tersebut, rapat kerja Badan Anggaran belum menyetujui usulan tambahan dana yang disampaikan Menko Polhukam untuk Badan Keamanan Laut sebesar Rp726,3 miliar karena belum sesuai ketentuan tata kelola administrasi yang berlaku.

Terkait dengan ketuk palu APBN-P 2015 itu, Ketua Banggar DPR RI, Ahmadi Noor Supit menyampaikan harapannya untuk keempat Kemenko tersebut. Menurutnya, Kemenko harus benar-benar dapat menjalankan tupoksinya untuk mengkoordinir Kementerian/Lembaga yang ada di bawahnya. Agar anggaran yang telah diterima masing-masing Kemenko dapat digunakan untuk menjalankan seluruh program yang telah direncanakan. *PS/ dbs*

Ketua Banggar DPR RI, Ahmadi Noor Supit menyampaikan harapannya untuk keempat Kemenko tersebut. Menurutnya, Kemenko harus benar-benar dapat menjalankan tupoksinya untuk mengkoordinir Kementerian/Lembaga yang ada di bawahnya

CSR PENTING BAGI PROGRAM KEMISKINAN

Anggaran CSR memiliki potensi besar untuk dapat dimanfaatkan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial. Ke depan program CSR diarahkan pada kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber dayanya.



Program CSR secara tidak langsung dinilai dapat membantu bahkan memperkuat program-program pemerintah yang memiliki keterbatasan. Ada potensi besar untuk anggaran CSR dari perusahaan swasta dan negara yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan dan pembangunan sosial.

Selama ini program CSR telah memberikan kontribusi yang sangat

signifikan bagi pembangunan sosial di Indonesia. Sejumlah industri telah menyalurkan dana CSR untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan sosial dan pengembangan masyarakat di pedesaan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani berharap, seluruh elemen pemerintah, swasta, hingga masyarakat bisa saling bekerja sama

membuat program CSR yang lebih baik dan bermanfaat. Sebab dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 255 juta jiwa diakuinya memang tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah sendiri.

"Pemerintah memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi kegiatan CSR perusahaan dan menggagas adanya penghargaan bagi program CSR terbaik," ujar Menko PMK saat membuka ASEAN NEXT-Gen CSR Forum

Breakthroughs for Inclusive and sustainable growth in ASEAN Post-2015 di Laguna Resort Bali Indonesia pada Kamis (5/2/).

Hadir dalam acara ini antara lain Sekretaris Jenderal ASEAN, Mr. Le Luong Minh, Ketua ASEAN CSR Network, Yanti Triwandiantini, Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta, Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Donald Bobiash, Duta Besar Swedia untuk Indonesia dan ASEAN, Johanna Brismar Skoog, Duta Besar Jepang untuk ASEAN Koichi Aiboshi, Direktur Kebijakan Ekonomi dan Perdagangan ASEAN, United Kingdom's Foreign and Commonwealth Office, Peter Mumford dan Ketua ASEAN CSR Network, Yanti Triwandiantini.

Menko PMK mengungkapkan bahwa Indonesia telah mengembangkan inisiatif hukum di bidang Corporate Social Responsibility (CSR) dengan membuat payung hukum untuk pelaksanaan CSR. Untuk perusahaan negara diatur dalam UU No.19/2003 dan Peraturan No.Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sedangkan untuk perusahaan swasta diatur dalam UU No 40/2007 yang ditujukan bagi perusahaan yang bisnisnya melibatkan sumber daya alam, memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

"Dalam regulasi ini mengamanatkan bahwa kewajiban CSR dijalankan dengan anggaran dan biaya dari perusahaan," ungkap Menko PMK.

Pentingnya UU khusus dalam penerapan CSR di Indonesia, tegas Menko PMK, karena jumlah penduduk yang besar

dan tersebar di sekitar 17.000 pulau yang terkadang sulit untuk menyampaikan program pembangunan ke daerah-daerah terpencil, seperti pulau-pulau kecil dan desa terpencil di sekitar hutan dan pegunungan. Di sisi lain anggaran pemerintah yang terbatas mengakibatkan terbatasnya akses ke daerah-daerah terpencil dan kurangnya infrastruktur.

Untuk itu, konsep kemitraan CSR di Indonesia melibatkan partisipasi aktif semua pihak, meliputi sektor publik (instansi pemerintah), swasta, dan masyarakat. Kolaborasi dan sinergi antar elemen tersebut sebagai bentuk nyata gotong royong membangun bangsa.

"Kita percaya bahwa kesejahteraan rakyat bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat." ujarnya.

CSR AWARD

Konsep kemitraan CSR di Indonesia melibatkan partisipasi aktif antara elemen-elemen, meliputi sektor publik (instansi pemerintah), swasta, dan masyarakat. Ke depan, banyak inisiatif pemerintah yang dapat dikembangkan bersama-sama dengan CSR. Kolaborasi gotong royong membangun bangsa antara pemerintah, swasta dan masyarakat ke depan diarahkan pada kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber dayanya, yaitu manusia, budaya, alam dan lingkungan hidup.

"Ke depan, kolaborasi gotong-royong membangun bangsa antara Pemerintah, swasta dan masyarakat harus diarahkan bagi terciptanya kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber dayanya yaitu manusia, budaya, alam dan lingkungan hidup," tegasnya.

Lebih lanjut Menko PMK menegaskan bahwa kemitraan antara Kementerian atau lembaga pemerintah dan sektor swasta telah dikembangkan lebih lanjut dalam dekade terakhir. Indonesia mengapresiasi program CSR, serta mengajak untuk mengembangkan dan menyelaraskannya dengan upaya pemerintah.

Hasilnya, beberapa industri pertambangan dan energi telah menerapkan program CSR, terutama untuk tujuan infrastruktur dan pembangunan sosial, serta pengembangan masyarakat pedesaan. Selain itu, integrasi program CSR ke Pengembangan Dokumen Rencana Kota / Kabupaten telah dikembangkan di beberapa provinsi besar dan kota-kota yang memiliki kantor atau industri pertambangan dan energi. Beberapa perusahaan juga telah mengembangkan organisasi sosial masyarakat (CSO), untuk memperkuat dan memperbesar jumlah penerima manfaat dari program CSR.

Di samping itu, terang Menko PMK, sebagai kementerian yang menjalankan fungsi koordinasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Corporate Forum for Community Development (CFCD) telah membentuk CSR Award Indonesia (ICA) sejak tahun 2009 dan memfasilitasi program CSR di tingkat kabupaten.

"Kami menggunakan ISO 26000SR sebagai standar dan evaluasi. Penghargaan Indonesia CSR Award (ICA) telah diberikan kepada korporasi yang melakukan program CSR terbaik setiap tiga tahun sekali," ungkapnya. (yn)

JEPANG (MASIH) MENUNGGU PERAWAT ASAL INDONESIA

Pasar luar negeri masih membutuhkan tenaga perawat asal Indonesia. Di dalam negeri, pemerintah terus berbenah untuk menciptakan para tenaga yang tidak cuma siap kerja tetapi berstandar internasional.

Pertemuan dengan kalangan pengusaha Jepang di sela-sela kunjungan untuk mengikuti konferensi dunia tentang pengurangan risiko bencana (WCDRR) Maret lalu, Menko PMK, Puan Maharani, coba menjawab tantangan Indonesia sebagai pemasok tenaga perawat dan penopang lansia. Di antara sekian banyak kebutuhan, tenaga perawat Indonesia nyatanya masih berkutat dengan masalah standarisasi yang belum sesuai dengan ketentuan internasional. Maka tidak heran bila kemudian masih sedikit saja tenaga perawat asal Indonesia yang diterima bekerja di Negeri Sakura itu.

“(Masalah standar internasional—red) itu yang harus kita benahi. Sejak awal mereka datang memang harus *di-training*, paling tidak standar yang diinginkan Jepang ini juga kompetensi yang dikirim ke negara lain. Kita harus dorong mereka supaya punya standar internasional. Saya juga sudah bilang ke Kementerian



Ristek dan Dikti bahwa bisa diberikan standar internasional. Ini mekanisme cerdas yang saya jalani, dengan mekanisme pendek sehingga bisa diterima di negara mana pun. Mereka yang sekolah di luar negeri ilmunya dipulangkan dulu ke Indonesia baru kita bisa kirim lagi pelajar ke luar negeri,” ujar Menko PMK.

Saat ini, seperempat dari penduduk Jepang merupakan lansia yang berusia lebih dari 65 tahun. Jumlah ini disinyalir akan meningkat hingga 40 persen pada tahun 2055 mendatang. Kebutuhan masyarakat Jepang yang memiliki lansia untuk mendapatkan perawat pribadi jadi mendesak. Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan lalu menyatakan bahwa Jepang perlu menambah satu juta suster dan perawat pribadi mulai tahun 2025.

Salah satu solusi yang terdengar mudah adalah mendorong datangnya

imigran. Sayangnya, Jepang bukan negara yang menerima imigran dengan senang hati karena memang jumlah imigran hanya 2 persen saja dari total populasi Jepang.

Membuka kran kedatangan imigran dalam skala besar jadi dianggap subjek yang sensitif sejak dikeluarkannya hukum yang membolehkan perawat dari negara asing untuk bekerja di Jepang sejak tahun 2008. Selain itu, standar yang ditetapkan juga tinggi. Hanya 204 perawat asing yang berhasil bekerja dan mencari kehidupan di Jepang. Menurut penulis Ayako Sono, sulitnya imigran masuk ke Jepang juga didukung oleh sikap tertutup warga Jepang dalam beradaptasi dengan orang yang berbeda latar belakang bahasa.

Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat,

jumlah perawat dari Indonesia yang diberangkatkan ke Jepang terus turun. Pada 2008, jumlah perawat yang diberangkatkan ke negara itu 208 orang dan pada 2014 hanya 187 perawat saja yang diberangkatkan.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam mengikuti standar kompetensi profesi adalah kemampuan berbahasa Jepang, baik lisan maupun tulisan. Masalah lain adalah ketatnya jam kerja selama magang membuat perawat Indonesia tidak sempat meningkatkan kompetensinya agar sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan, misalnya memperdalam penguasaan bahasa Jepang dan mempelajari sistem kesehatan di negara itu.

Kenyataannya, mayoritas perawat Indonesia adalah lulusan diploma tiga (D-3). Dari 300 program studi keperawatan Indonesia, baru 50-60 persen yang menggelar pendidikan keperawatan profesional atau *nurse*. Ada satu tahun penuh praktik dan uji kompetensi setelah lulus sebagai sarjana keperawatan. Sertifikasi kompetensi dari uji kompetensi jadi syarat mengurus surat tanda registrasi.

Persoalan lain adalah pengakuan secara legal dari negara untuk bisa menjalankan asuhan keperawatan. Dalam *Mutual Recognition Agreement (MRA)* bagi sektor/jasa keperawatan yang ditandatangani di Cebu, Filipina, 18 Desember 2006, negara tujuan mengakui kualifikasi profesional dan muatan latihan di negara asal perawat. Namun, ada proses penentuan standar yang diterapkan di negara bersangkutan.

Sejauh ini, proses registrasi yang dilakukan juga belum berjalan dengan baik. Sebelum tahun 2012, hanya perawat dari institusi pendidikan milik pemerintah yang teregistrasi. Baru pada 2012, proses registrasi dilakukan lebih baik. Dari sekitar 300.000 perawat yang bekerja tahun itu, baru sekitar 1.000 orang yang mengantongi surat tanda registrasi.



Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan menyebutkan, Konsil Keperawatan Indonesia paling lambat terbentuk pada Oktober 2016. Padahal, pasar bebas tenaga kerja ASEAN dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN akan dimulai pada 31 Desember 2015. Jika tidak memiliki konsil keperawatan, perawat Indonesia terancam tidak diakui negara tetangga dan negara kawasan lain, seperti Jepang.

Tidak hanya itu, Keberadaan para perawat yang bekerja di sejumlah rumah sakit di Tanah Air, terutama rumah sakit berstandar internasional ataupun fasilitas layanan kesehatan di perusahaan-perusahaan multinasional, terancam oleh masuknya para perawat profesional dari negara tetangga, seperti Filipina dan Thailand.

Namun, menurut Deputi Penempatan dan Perlindungan TKI BNP2TKI, Agusdin Subiantoro, Pemerintah Jepang sebenarnya sangat mengapresiasi kinerja para perawat asal Indonesia, hanya memang masih terkendala dengan soal kemampuan bahasa.

Untuk itu, lanjut Agusdin, sebelum diberangkatkan, para TKI akan

mengikuti pelatihan bahasa Jepang selama enam bulan di PPPPTK Bahasa Jakarta. Setelah masa enam bulan berakhir, dilanjutkan dengan tes bahasa Jepang di Japan Foundation. Apabila lulus, lalu dapat berangkat ke Jepang untuk ikut pelatihan kembali selama enam bulan. Jika tidak lulus, masih diberi kesempatan ikut tes *Japan Language Proficiency Tes (JLPT)*.

"Jika lulus minimal N5 TKI dapat berangkat ke Jepang untuk ikuti pelatihan selama 6 bulan," ungkap Agusdin seperti dikutip dari *beritasatu.com*.

Meski mendapat prioritas tetapi pemerintah Indonesia meminta atensi Jepang untuk melakukan beberapa perbaikan. Indonesia mengusulkan agar persyaratan pengalaman kerja dua tahun direvisi menjadi satu tahun. Lalu adanya TKI *nurse* dan *careworker* yang kesulitan mengikuti ujian nasional (UN) membuat rumah sakit dan panti lansia untuk memberikan kesempatan belajar yang cukup.

Usulan ketiga, tambah Agusdin, adalah tes wawancara, tes sikap, dan *Japanese Quiz* yang dilakukan di daerah kantong pengiriman kedua jenis TKI ini. Tujuannya untuk meningkatkan penyebaran jumlah pendaftar dari seluruh provinsi. **(IN)**

BUILDING PERSONAL BRAND EQUITY

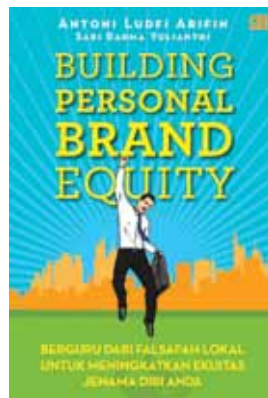
Judul Buku : Building Personal Brand Equity: Berguru dari Falsafah Lokal untuk Meningkatkan Ekuitas Jenama Diri Anda
 Penulis : Anton Lutfi Arifin dan Sari Rahma Yulianthi
 Penerbit : Gramedia
 Tahun Terbit : Maret 2015

Sebagian leluhur kita, tokoh-tokoh pemimpin seperti kepala adat, kepala suku, ataupun penghulu (kepala/lurah kampung) memiliki tradisi menanam pohon pinang di halaman depan rumah. Pohon itu kemudian tumbuh tegak lurus semampai. Pohon itu, selain memperindah halaman, juga melambangkan kelurusan budi, kesederhanaan watak, dan kejujuran si empunya rumah.

Karakter diri yang baik —lurus budi, sederhana watak, dan jujur diri—selalu diajarkan oleh orangtua kita. Selanjutnya, kitalah yang memupuknya setiap hari dengan nilai-nilai penguat jenama (merek) diri. Dengan demikian, kelak karakter diri akan mengharumkan nama, meninggalkan jejak-jejak “kebaikan”. Nilai-nilai penguat jenama diri ini kami bagi dalam empat kelompok kapital, yaitu:

1. Modal intelektual (intellectual capital), meliputi kualitas personal dan keunikan;
2. Modal emosional (emotional capital), yaitu kemampuan melayani (serviceability);
3. Modal spiritual (spiritual capital), yaitu menepati janji, kejujuran, dan kepercayaan serta kredibilitas;
4. Modal keuangan (financial capital), yaitu harga diri/kebanggaan diri.

Buku Building Personal Brand Equity: Berguru dari Falsafah Lokal untuk Meningkatkan Ekuitas Jenama Diri Anda ini mengajak Anda untuk memupuk kualitas diri agar menjadi insan yang memiliki kompetensi berbeda (distinctive competencies). Tidak hanya berbeda, tetapi kompetensi yang dimiliki juga harus mampu menjadikan Anda mau membantu orang lain yang membutuhkan.



KONSEP EKONOMI SANG PROKLAMATOR

Judul Buku : Ekonomi Berdikari Soekarno
 Penulis : Amiruddin Ar-Rahab
 Penerbit : Komunitas Bambu
 Tahun Terbit : 2014

Berdikari tidak berarti mengurangi, melainkan memperluas kerja sama internasional, terutama antara semua negara yang baru merdeka. Yang ditolak oleh berdikari adalah ketergantungan pada imperialis, bukan kerja sama yang sederajat dan saling menguntungkan. (Kutipan Sukarno)

Ekonomi terpimpin merupakan salah satu konsep yang dicetuskan oleh Sukarno Sang Proklamator yang kemudian ditegaskan dalam Keputusan MPRS pada 1960. Namun demikian formulasi operasionalnya masih diperdebatkan oleh berbagai elemen masyarakat, partai dan golongan. Ekonomi terpimpin yang dimaksud Sukarno bertolak dari prinsip negara sebagai pusat kekuatan ekonomi dengan menguasai alat-alat produksi, distribusi, dan modal.

Dalam prosesnya, ekonomi terpimpin bertujuan untuk membangun perekonomian nasional yang kukuh dengan melaksanakan mekanisasi pertanian dan industrialisasi. Terutama pada industri dasar seperti baja, kimia dasar, dan mesin atau industri berat. Praktik yang harus dilakukan adalah menghubungkan pertanian dengan industri sehingga menumbuhkan daya beli masyarakat dan melepaskan ketergantungan pada modal asing. Oleh karenanya pada fase ekonomi terpimpin dilakukan penyitaan terhadap perusahaan-perusahaan asing.

Berdikari dalam konsep ekonomi terpimpin kental dengan konsep antikolonialisme, yang artinya adalah mengembalikan kedaulatan kepada bangsa Indonesia yang merdeka dan sebagai pemilik sah kekayaan Indonesia. Dengan demikian memutus ketergantungan kepada modal maupun orang asing.

Secara konseptual ekonomi terpimpin merupakan satu pandangan alternatif dalam menghadapi perkembangan kapitalisme, kolonialisme dan feodalisme. Ini dipertajam melalui pernyataan Sukarno 1963 ketika deklarasi ekonomi (Dekon) dikumandangkan sebagai jalan ke pembangunan ekonomi yang stabil dengan dasar anti imperialisme, kolonialisme dan feodalisme



ING NGARSA SUNG TULADA, ING MADYA MANGUN KARSA, TUT WURI HANDAYANI

Judul Buku : Emong, Among, Pamong: Visi Pendidikan Ki Hadjar Dewantara
Penulis : Bartolomeus Somho
Penerbit : Kanisius
Tahun Terbit : 2013



Nama aslinya adalah Soewardi Surjaningrat yang lahir pada hari Kamis Legi tanggal 2 Puasa 1818 atau tanggal 2 Mei 1889. Ayahnya adalah Kanjeng Pangeran Harjo Surjaningrat, putra dari Sri Paku Alam III dengan permaisuri kerabat keraton Yogyakarta.

Akan tetapi, sosoknya dihormati oleh segenap lapisan masyarakat Indonesia sehingga tercatat dalam tinta emas sejarah bangsa bukan karena gelar akademis maupun alasan genealogis tersebut, melainkan karena integritas, totalitas, loyalitas dan komitmennya untuk memerdekakan bangsa dari berbagai situasi tiranik.

Buku berjudul lengkap *Emong, Among, Pamong: Visi Pendidikan Ki Hadjar Dewantara* ini, berusaha menghadirkan gagasan dan pemikiran dari sosok pemimpin, pejuang dan pendidik sejati bangsa Indonesia yang dikenal dengan semboyan *ing ngarsa*

sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani tersebut dengan interpretasi penulisnya.

Kepribadiannya yang rendah hati dan merakyat, membuat ia mengambil keputusan pada tanggal 23 Februari 1928 atau tepat berusia 40 tahun untuk mengganti nama dengan yang lebih “merakyat”, yakni Ki Hadjar Dewantara. Karena pemikiran kritisnya yang tertuang dalam surat kabar *de Express* Ki Hadjar harus rela menjalani hukuman buang (internering) ke Pulau Bangka. Hukuman tersebut kemudian dialihkan ke negeri Belanda.

Ki Hadjar begitu yakin bahwa bila kemerdekaan adalah hal terpenting dalam kehidupan manusia maka pendidikan adalah cara yang tepat dan manusiawi untuk mencapai atau memilikinya. Dalam pengertian itu pula, pendidikan dapat dimengerti sebagai wahana menuju kemerdekaan kemanusiaan dalam pengertian yang luas.

TIGA PIONIR NASIONALISME INDONESIA

Judul Buku : Keselarasan & Kejanggalan
Penulis : Savitri Scherer
Penerbit : Komunitas Bambu
Tahun Terbit : 2012

Akhir abad 19, menjadi babakan baru dalam sejarah pendidikan kaum pribumi seiring banyaknya para priyayi Jawa yang belajar di sekolahan Belanda. Mulai dari sekolah dasar, ELS, hingga sekolah kedokteran, STOVIA. Hasilnya, bak jamur di musim hujan, banyak bermunculan kaum muda pribumi yang bukan hanya berpendidikan dan melek pengetahuan Barat, namun juga memiliki kesadaran politik dan organisasi. Puncaknya, pada tahun 1908, kalangan priyayi muda ini membentuk Boedi Oetomo, yang dimaksudkan sebagai wadah bersatunya kaum priyayi, guru, dan dokter di tanah Jawa.

Organisasi ini menjadi kawah candaradimuka bagi para priyayi terpelajar tersebut untuk menempa diri. Aspirasi utama Boedi Oetomo sendiri adalah menciptakan keserasian dalam tatanan masyarakat Jawa yang pada saat itu tengah mengalami pergeseran dalam nilai-nilai sosial dan kebudayaannya.

Buku berjudul *Keselarasan & Kejanggalan* ini, berusaha melacak jejak pemikiran tiga pionir terkemuka Boedi Oetomo; Soetomo, Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat mengenai awal Indonesia modern dan bangkitnya nasionalisme di awal abad 20. Buku setebal 259 Halaman ini, bukan saja memberikan informasi berharga kepada para pembaca muda Indonesia kini perihal pemikiran tiga tokoh peletak dasar kebangsaan di atas, namun lebih dari itu, karya ilmiah Savitri Scherer berupa tesis pada Universitas Cornell ini juga melecut kesadaran kita, betapa gagasan-gagasan yang mereka miliki begitu maju dan melampaui zamannya dengan penuh semangat egalitarian. Selamat membaca.



MENANTI SDM BERKUALITAS DARI KAMPUS

Bonus demografi seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia terutama kesiapan SDM-nya. Salah satu kuncinya, pendidikan dengan kualitas yang baik.



Medio Maret lalu, Kantor Kemenko PMK menggelar *Focus Group Discussion (FGD)* yang membahas mengenai gagasan baru peningkatan kualitas pendidikan tinggi. FGD yang dipimpin langsung oleh Deputi bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Sartono, itu dilatarbelakangi oleh bonus demografi Indonesia yang dapat menjadi modal besar bagi peningkatan produktivitas ekonomi dan pengembangan pasar domestik terutama dalam menghadapi MEA di tahun 2015 ini.

Tantangan yang harus dihadapi SDM Indonesia di tahun ini adalah dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai akhir tahun 2015. MEA merupakan bagian dari implementasi komunitas ASEAN yang disepakati melalui *Bali Concord II* yang disahkan pada KTT ASEAN di Bali, 12 tahun silam.

“Kesempatan emas (yang terjadi dalam waktu antara tahun 2010 hingga 2025—red) hanya akan menjadi bonus jika SDM kita berkualitas. Semua itu dapat dicapai melalui pendidikan. Pada tahun 2013, lebih dari 65 persen angkatan kerja kita berpendidikan setingkat

SMP dan 90 persen berpendidikan setingkat SMA,” papar Agus di hadapan pimpinan perguruan tinggi yang turut hadir dalam FGD itu.

Mempersiapkan SDM yang handal melalui jalur pendidikan, terutama pendidikan tinggi, di kalangan akademisi diketahui masih berkuat dengan permasalahan mutu pendidikan, demikian pula dengan kualitas para pengajarnya atau dosen.

Bicara tentang mutu pendidikan, menurut Guru Besar ITB dan juga Wakil Ketua AIPI, Satrio Soemantri Brodjonegoro, persoalan paling mendasarnya terletak pada belum



adanya pemahaman tentang mutu pendidikan yang sebenarnya.

“Mutu pendidikan secara pragmatis diwujudkan dalam bentuk akreditasi sekolah dan akreditasi perguruan tinggi, padahal definisi mutu hakiki adalah jauh lebih dalam dan mendasar dibandingkan akreditasi. Definisi mutu pendidikan yang hakiki adalah pendidikan yang mampu memberdayakan individu maupun kelompok individu serta masyarakat pada umumnya. Mutu pendidikan sering kali dikaitkan dengan hasil UN sekolah maupun peringkat universitas tingkat nasional dan internasional.” Papar Satryo dalam tulisannya yang dimuat di *Harian Kompas* awal Maret lalu.

Atas dasar pemahaman seperti itu, Satryo melihat bila sekolah dan perguruan tinggi saat ini saling berlomba demi meraih peringkat lebih tinggi dalam akreditasi dan nilai tertinggi dalam UN. Semakin tinggi peringkat yang diraih, jumlah peserta didik yang masuk lembaga pendidikan itu tentu akan lebih banyak, lebih mungkin merekrut tenaga pengajar terbaik, mendapat insentif pendanaan yang lebih tinggi, diakui masyarakat luas, dan sebagainya.

“Keberhasilan pendidikan atau manfaat pendidikan terwujud jika masyarakat terdidik berdaya mampu menyejahterakan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya. Keberdayaan masyarakat seyogianya

jadi tolok ukur keberhasilan pendidikan di mana masyarakat Indonesia menjadi masyarakat mandiri madani sejahtera. Karena itu, perlu pendefinisian kembali tolok ukur pendidikan dengan mencermati tingkat keberdayaan masyarakat. Selama ini tolok ukurnya lebih bersifat pencitraan di mana lembaga pendidikan mencari akreditasi dan peringkat tinggi, sedangkan masyarakat umumnya mencari status sosial dengan ijazah.”

Fakta tentang mutu pendidikan itu lalu ditambah dengan kualitas tenaga pengajar terutama di perguruan tinggi terkait peran mereka dalam menciptakan para sarjana yang tidak hanya punya keahlian dan keterampilan akademik yang baik, tetapi juga yang punya integritas dan siap masuk lapangan kerja.

Syarat yang harus dipenuhi oleh dosen, menurut Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Edy Suandi Hamid, harus memiliki kemampuan baik serta ilmu yang selalu berkembang.

Permasalahan yang dialami sejauh ini adalah jumlah dosen yang masih kurang di sebagian besar perguruan tinggi. Kemudian, tidak semua dosen memiliki kriteria yang standar seperti mencapai pendidikan S-2 dan S-3. Belum lagi, masih sedikit perguruan tinggi yang melakukan upaya peningkatan mutu. Tentu saja menyiapkan tenaga dosen yang baik menjadi sangat krusial untuk menghasilkan sarjana yang berkualitas juga.

“Selain itu, dosen dituntut untuk terus belajar, meneliti, ikut pelatihan agar selalu *up date* ilmu pengetahuan dan teknologinya. Kalau dosen statis, maka dapat dipastikan ia mengajar sesuatu yang basi,” tutur guru besar Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia itu.

Yang terpenting, tambah Edy, dosen tidak boleh merasa paling pintar. “Dosen harus bisa *open minded*. Ia juga mengikuti perkembangan ilmu dan memublikasikan karyanya di level global.”

Edy mengatakan, selama ini kendala yang dihadapi para dosen untuk menghasilkan SDM berkualitas, di antaranya sarana dan prasarana yang terbatas. Misalnya, kurangnya fasilitas buku di perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Namun, faktor lain juga berasal dari dosen itu sendiri.

“Semua terkait keterbatasan ilmu dan waktu. Dosen banyak *nyambi* atau bahkan menjabat sehingga kurang baik dan kurang disiplin dalam mengajar,” ujar Edy lagi.

Edy mengimbau kalau sudah seharusnya setiap kebijakan dapat dibuat bersama antara PT dan Dikti. Tidak hanya terbatas pada perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta melalui APTISI, misalnya, perlu dilibatkan juga.

Dari sisi mahasiswa atau calon sarjana, sudah diketahui pasti bila budaya membaca masih belum melekat di tengah pergaulan mereka sehari-hari di kampus. Demikian pula dengan rasa ingin tahu dan kritis yang belum terbentuk.

Jika masih banyak sarjana yang menganggur, masalah mungkin dapat ditelusuri dari faktor kedekatan antara perguruan tinggi dengan dunia industri atau usaha yang terlihat masih belum sinergis, bahkan belum tercipta sama sekali jalinan kerja sama untuk menyediakan lapangan kerja bagi para sarjana yang baru lulus itu. (IN)

SEDAPNYA KECAP DARI AIR KELAPA

Cara membuat kecap air kelapa hampir sama dengan kecap dari bahan kacang kedelai. Bahkan prosesnya jauh lebih mudah dan tidak memakan waktu pembuatan yang terlalu lama.

Di Indonesia tanaman kelapa telah dikenal sejak zaman dahulu sebagai tanaman serba guna. Maklum tanaman kelapa dapat dimanfaatkan mulai dari pucuk sampai ke akarnya bagi kehidupan manusia. Sampai saat ini tanaman kelapa masih merupakan salah satu tanaman terpenting di Indonesia. Komoditas ini pada umumnya diusahakan oleh rakyat.

Tanaman kelapa di Indonesia sendiri hampir ada di seluruh pelosak nusantara. Tak pelak, produksi buah kelapa cukup melimpah. Meski demikian, pemanfaatan buah kelapa terbatas dan kebanyakan diprioritaskan konsumsi langsung ataupun dimanfaatkan santannya. Air kelapa bahkan banyak yang dibuang percuma. Belum banyak alternatif untuk mengoptimalkan pemanfaatan

air kelapa menjadi suatu produk. Padahal air kelapa bisa diolah menjadi kecap.

Kecap merupakan salah satu jenis bumbu masakan yang banyak disukai orang. Biasanya digunakan untuk campuran makan bubur, bakso, soto, sate dan banyak lagi makanan lainnya. Awalnya kecap dibuat orang dari bahan baku kacang kedelai. Kecap dari kacang kedelai ini sangat digemari karena cita rasa yang ditimbulkannya sangat nikmat. Adanya teknologi kuliner yang terus berkembang berhasil menemukan bahan baku lain untuk membuat kecap yang tak kalah nikmatnya dengan kecap kedelai yaitu air kelapa.

Kecap air kelapa tidak jauh berbeda dengan kecap yang lainnya, namun cita rasa, kandungan

protein. Cita rasa kecap yang bahan bakunya air kelapa sangat khas bila dibandingkan dengan kecap jenis lainnya misalnya kecap yang diproduksi melalui proses hidrolisa.

Kecap air kelapa bila dilihat dari tampilan dan warnanya persis sama dengan kecap kedelai. Tetapi teksturnya agak sedikit kasar oleh karena rempah-rempah bumbunya yang kadang tidak teracik secara halus seperti halnya kecap kedelai yang diproduksi oleh pabrik besar. Tetapi aroma dan flafournya tidak kalah nikmat dan menarik.

Cara membuat kecap dari air kelapa ini sebenarnya telah lama dikenal oleh masyarakat. Meski belum terlalu memasyarakat di kalangan petani, sebenarnya melalui latihan ini diharapkan kegiatan pembuatan kecap dari air kelapa

akan menjadi kebiasaan yang dapat menghasilkan tambahan pendapatan rumah tangga.

TEKNIK PEMBUATAN

Resep kecap air kelapa dibuat untuk mengoptimalkan pemanfaatan limbah air kelapa agar menjadi suatu produk yang murah dan pembuatannya mudah yaitu kecap, air kelapa akan memberikan rasa gurih pada kecap yang di hasilkan. Pada prinsipnya, pembuatan kecap air kelapa sama dengan pembuatan kecap dengan bahan kacang kedelai, bahkan jauh lebih mudah dan tidak memakan waktu pembuatan yang terlalu lama.

Proses pembuatan kecap dari air kelapa ini terbilang cukup mudah. Pembuatannya sangat sederhana, yakni melalui beberapa tahapan antara lain; proses penjernihan air kelapa, proses persiapan bumbu, proses pemanasan/penggodokan dan pengolahan, proses penyaringan dan penambahan bahan pengawet dan proses pembotolan/pengepakan.

Dalam proses pejernihan dapat dilakukan dengan jalan membiarkan sejumlah air kelapa dalam bak penampungan. Selama didiamkan air kelapa akan terpisah dengan kotoran-kotoran yang mengendap pada lapisan bawah.

Pengambilan air kelapa jernih dilakukan dengan jalan mengalirkan pipa yang tidak tercelup sampai bawah. Kemudian air kelapa ini

ditampung dalam bak atau langsung dimasukkan kedalam alat pemanas. Selain itu, penjernihan air kelapa dapat juga dilakukan dengan jalan menyaringnya langsung dengan saringan yang telah disediakan.

Untuk bumbu kecap, beberapa bahan yang perlu disiapkan yaitu pekak, kemiri, bawang putih, kluak, lengkuas dan sereh, dalam



pengolahan awal haruslah disangrai terlebih dahulu (digoreng tanpa minyak/sedikit minyak). Kemiri dan bawang putih ditumbuk dahulu, kemudian ditumis/digoreng dengan sedikit minyak goreng.

Pada proses penggorengan bahan tersebut diusahakan jangan sampai terlalu gosong, sebab jika terlalu gosong akan mempengaruhi rasa kecap (pahit). Sedangkan kluak dipecahkan, kemudian direndam dalam air sebentar dan seterusnya digiling. Sedangkan lengkuas dibersihkan kemudian diiris tipis-tipis dan sereh dimemarkan. Untuk gula

merah diiris, kemudian dipanaskan hingga meleleh.

Jika semua bahan bumbu sudah siap, maka pemanasan air kelapa dimulai. Selama pemanasan berlangsung bumbu-bumbu dimasukkan kedalamnya sebagai penyedap rasa. Untuk vetsin sebaiknya ditambah setelah pemanasan dianggap selesai.

Selama pemanasan berlangsung jangan lupa diaduk agar panasnya merata dan tidak gosong. Pemanasan dianggap selesai jika cairan sudah mulai mengental dan dites dengan mengambil cairan tersebut tidak putus alirannya.

Proses selanjutnya, penyaringan dan penambahan bahan pengawet. Kecap hasil pemanasan dipindahkan kedalam tempat yang telah dilengkapi alat penyaring. Hasil penyaringan ini kemudian ditambahkan bahan pengawet, bahan pengawet yang digunakan adalah asam benzoat 0,02 %.

Penambahan bahan pengawet ini untuk mencegah terjadinya jamur pada kecap selama kecap disimpan dan juga menjaga agar tidak terjadi perubahan rasa selama kecap belum dimanfaatkan. Bahan pengawet ini ditambahkan setelah penyaringan selesai. Untuk meratakan bahan pengawet ini kecap diaduk sebentar.

Usai penyaringan, hasil kecap dapat dimasukkan ke dalam botol yang bersih untuk mencegah bakteri-bakteri yang akan merusak kecap. Kemudian disimpan untuk digunakan untuk konsumsi sendiri atau bisa juga dijual. (yn/dbs)

TANTANGAN STUNTING DAN INDONESIA SEHAT 2020

TB. Rachmat Sentika *

Pemerintah Indonesia telah menancapkan Visi Indonesia Sehat 2020 yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan secara mandiri untuk hidup sehat bagi setiap orang sehingga terwujudnya derajat kesehatan secara optimal. Harapan untuk mencapai Indonesia Sehat 2020 saat ini menghadapi tantangan khususnya mengenai peningkatan status gizi.

Hasil RISKESDAS 2013 menunjukkan kurang gizi yang diukur dengan stunting prevalensinya pada balita mencapai 37,2 %. Prevalensi balita yang mengalami wasting (kurus) mencapai 12,1 %. Selain 2 indikator pada balita, angka obesitas pada usia lebih dari 18 tahun meningkat dari 21,7 % pada tahun 2010 menjadi 28,9 % pada tahun 2013 dan Anemia pada Ibu hamil mencapai 37,1 %.

Permasalahan kekurangan gizi kronis yang diakibatkan pemberian makanan yang tidak memenuhi kebutuhan gizi sehingga asupan gizi yang dibutuhkan tubuh tidak mencukupi dalam waktu yang cukup lama dan mengakibatkan keadaan tubuh yang pendek dan sangat pendek sehingga melampaui

defisit minus 2 SD dibawah median tinggi badan. Kondisi stunting di Indonesia saat ini lebih dari sepertiga anak dibawah lima tahun, tinggi badannya berada di bawah rata-rata. Hal ini menempatkan Indonesia berada di peringkat kelima dunia untuk jumlah anak dengan kondisi stunting.

Keadaan ini bisa dicegah dengan terpenuhinya kebutuhan gizi untuk ibu hamil khususnya asupan gizi seimbang, suplementasi Zat Besi (Fe) dan terpantaunya status kesehatannya, melalui 3 (tiga) langkah, yaitu : pemberian ASI Eksklusif kepada bayi hingga usia 6 bulan dan pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) setelahnya yang berkualitas dan cukup kuantitas; pemantauan secara berkala kondisi tumbuh kembang balita guna dideteksi sedini mungkin gangguan, dan menjaga kebersihan lingkungan serta peningkatan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi.

Intervensi terkait dengan sanitasi dan kesehatan lingkungan dibutuhkan. Sanitasi dan kesehatan lingkungan yang rendah memicu timbulnya gangguan yang berkaitan dengan penyerapan asupan gizi pada balita. Penelitian

yang dilakukan oleh Charles Schmidt (2014) mengungkapkan bahwa stunting meningkat seiring dengan peningkatan intensitas diare pada anak. Hasil riset yang diungkapkan oleh Bhutta dkk (2008) menggambarkan potensi stunting berkurang jika ada intervensi yang terencana dan terfokus pada perubahan perilaku dalam sanitasi dan kebersihan.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mengurangi stunting dan peningkatan standar sanitasi lingkungan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 28% pada 2019. Pemerintah dan stakeholder menyepakati intervensi gizi langsung (spesifik) guna mencegah dan menanggulangi stunting di Indonesia, diantaranya: promosi ASI dan MPASI yang bergizi seimbang, pemberian tablet dan pendidikan mengenai pentingnya zat besi – asam folat atau multivitamin dan mineral untuk ibu hamil dan menyusui, pemberian zat penambah gizi mikro untuk anak, pemberian obat cacing pada anak, pemberian suplemen Vitamin A untuk balita, penanganan anak dengan gizi

buruk, fortifikasi makanan dengan zat gizi mikro seperti Vitamin A, zat besi dan yodium,. Selain itu dilakukan pencegahan dan pengobatan malaria bagi ibu hamil, bayi dan anak-anak. Untuk evaluasi efektivitas pemberian MP-ASI yang beredar di masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah, LSM dan Industri Pangan serta penelitian mengenai pengetahuan, sikap dan perilaku (KAP) tentang MP-ASI di berbagai kelompok social masyarakat.

Selain intervensi gizi langsung (spesifik), pemerintah juga mengupayakan intervensi sensitif terhadap hal-hal yang memberikan pengaruh dalam peningkatan gizi, diantaranya: Intervensi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan membiasakan cuci tangan pakai sabun, peningkatan akses air bersih, stimulasi psikososial bagi bayi dan anak-anak, melakukan evaluasi mengenai pengalaman program Gizi-KB di Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK).

Di samping itu, kebun gizi di rumah / disekolah untuk memperkuat ketahanan gizi anak melalui diversifikasi pangan, peternakan dan perikanan sebagai sumber protein hewani, bantuan langsung bagi masyarakat seperti RASKIN dan akses ke pangan untuk pemenuhan gizi seimbang dan pendidikan tentang kesehatan dan gizi.

Peningkatan advokasi kepada pemerintah daerah yang tingkat konsumsi garam yodiumnya rendah serta penegakkan hukum terhadap pelanggaran SNI khususnya terkait dengan yodium.

Selain itu, pendidikan tentang Gizi seimbang menjadi bahasan

utama disetiap acara pendidikan dengan sasaran guru SD dan jurnalis. Pendidikan persiapan perkawinan yang sehat ditinjau dari aspek kesehatan, usia dan budaya melalui program kerjasama Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Agama dan Dalam Negeri. Puskesmas berwenang untuk memeriksa kesehatan calon pengantin agar bebas dari kekurangan gizi, serta sinkronisasi UU perkawinan dan UU perlindungan anak

Komitmen pemerintah untuk mengatasi permasalahan stunting ditunjukkan dengan meluncurkan “Gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan” yang dikenal dengan sebutan 1.000 HPK. Seribu hari di sini adalah seribu hari pertama kehidupan, yaitu 270 selama masa di dalam kandungan dan 730 hari selama masa 2 tahun pertama pasca lahir. Tujuannya dapat mempercepat perbaikan gizi di masyarakat sehingga kecerdasan anak-anak Indonesia meningkat guna menciptakan generasi produktif dan berdaya saing.

Pemerintah juga telah membuat Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yakni program pendekatan untuk menciptakan

masyarakat yang berperilaku higienis dan selalu menjaga sanitasi lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan. Sasaran utamanya mengurangi kejadian diare dan penularan penyakit akibat lingkungan yang kotor. Sehingga derajat kesehatan optimal dengan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan secara mandiri untuk hidup sehat bagi setiap orang yang tercantum dalam visi Indonesia Sehat 2020 dapat terwujud.

**(*Deputi Kesehatan,
Kependudukan dan KB
Kemenko PMK)**



GEMERLAP ALA KABUPATEN LAMONGAN

Sejak 2011 program Gemerlap dicanangkan dan menjadi program unggulan. Program memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan kehidupan masyarakat Lamongan.

Inovasi pembangunan desa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur layak dijadikan rujukan daerah lain di Indonesia. Inovasi itu dinamakan gerakan membangun ekonomi rakyat Lamongan berbasis pedesaan (gemerlap). Program yang dijalankan mentargetkan terjadinya peningkatan ekonomi masyarakat. Melalui program ini diiharapkan mampu memberdayakan ekonomi masyarakat pedesaan guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya.

Gemerlap menjadi merupakan program unggulan di bidang ekonomi yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada era Kepemimpinan Bupati H. Fadeli, S.H., M.M. Programnya berfokus pada pembangunan ekonomi pedesaan, dengan menitikberatkan pada bidang: pertanian dan kehutanan; perikanan dan kelautan; peternakan; koperasi, perindustrian dan perdagangan; serta infrastruktur pedesaan.

Pada tahun 2011 program Gemerlap mulai dicanangkan

dengan latar belakang kondisi perekonomian yang terus tumbuh namun belum merata dinikmati masyarakat. Masyarakat pedesaan masih belum merasakan dampak dari semakin baiknya perekonomian daerah. Untuk mengurangi kesenjangan itu program Gemerlap dijadikan andalan untuk mendongkrak kesejahteraan 60 persen masyarakat Lamongan yang berada di pedesaan serta memberdayakan sekitar 250 ribu lebih UMKM yang bergerak di berbagai sektor.



Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama dengan segenap unsur masyarakat melakukan kerja sama dalam upaya peningkatan investasi, produktivitas ektor-sektor andalan, dan pendayagunaan sumber daya alam yang ada. Program Gemerlap berfungsi menstimulasi produk-produk unggulan di setiap desa dan kecamatan agar produktivitasnya meningkat. Stimulasi itu berbentuk bantuan permodalan maupun pembinaan teknis secara intensif. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan membentuk mentalitas masyarakat agar tidak pantang menyerah dan berjuang hingga berhasil.

Salah satu contoh bentuk programnya, desa yang memiliki potensi unggulan pertanian padi didorong dengan pengaktifan lumbung pangan. Saat ini, di Lamongan ada sekitar 238 lumbung pangan dan 40 di antaranya telah berlevel modern. Sementara desa yang memiliki potensi peternakan lele didorong dengan bantuan teknologi dan peralatan kolam lele dari terpal untuk menyiasati keterbatasan lahan.

Di sektor peternakan, Pemkab mendorong peternakan kambing di lahan kosong, pematang tambak, serta di wilayah Lamongan selatan yang berbatasan dengan kawasan hutan. Seperti kawasan ternak kambing terpadu ramah lingkungan oleh Kelompok Mandiri di Dusun Kudu, Desa Weduni, Kecamatan Deket.

Di itu, diberikan juga bantuan permodalan dan bimbingan teknis terhadap peternakan itik di Desa Tawangrejo, Kecamatan Turi. Usaha ini di jalankan oleh para ibu-ibu. Meski dijalankan kaum perempuan, peternakan itik ini mampu berjalan dengan sukses. Bahkan pada tahun

2012 mampu meraih penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara dan Ketahanan Pangan 2012 kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan.

Segala usaha yang dilakukan masyarakat desa ini juga ditopang dengan perbaikan alur ekonomi dari hulu hingga hilir. Di sektor pemasyarakat Pemkab Lamongan, melakukan berbagai perbaikan pasar.. Sedikitnya ada 31 pasar desa yang direhab sejak 2011 hingga 2013. Tujuannya agar putaran perekonomian desa akan bergerak cepat dan semakin menggairahkan warga untuk membuka usaha di bidang unggulan potensi desanya masing-masing.

AYAM HINGGA KERAPU

Program Gemerlap kini juga sangat dirasakan Kelompok Ternak Barokah, Desa Pule, Kecamatan Modo. Bantuan ternak ayam petelur yang diperoleh dari program ini menjadi harapan baru bagi kesejahteraan. Desa ini, diakui para peternak, memang sangat cocok untuk usaha peternakan. Bahan baku pakan ternak, seperti jagung dan dedek sangat melimpah. Sehingga ongkos produksi dapat ditekan. Selain itu sumber air di Desa Pule, terutama di Kecamatan Modo dan sekitarnya juga melimpah.

Pada tahun 2014, Kelompok Ternak Barokah mendapatkan bantuan 3 ribu ekor ayam petelur. Dengan dikoordinir kelompok ternak, produksi telur hariannya rata-rata mencapai 90 persen atau sekitar 155 kilogram. Telur produksi itu kemudian dijual di Pasar Modo.

Untuk menjaga keberlangsungan ternak milik kelompok tersebut, bersama Ketua Kelompok Ternak Barokah Suharto yang memiliki 23 anggota, keuntungan dari ternak itu

dimasukkan ke Koperasi Barokah yang dibentuk warga. Dengan adanya koperasi ini, warga bisa memanfaatkan dananya untuk kegiatan simpan pinjam ketika ada kebutuhan mendesak untuk sekolah atau berobat. Sehingga bisa menjauhkan dari rentenir. Sedangkan untuk sisa hasil usaha (SHU) dari koperasi itu akan digunakan untuk ongkos produksi pembelian ayam yang sudah afkir.

Wujud nyata dari program gemerlap juga dirasakan masyarakat Dusun Kentong, Desa Labuhan Kecamatan Brondong. Melalui program ini dibangun tempat sentra penghasil kerapu yang bernama "Kampung Kerapu". Kampung kerapu memiliki luas lahan tambak mencapai 47 Ha dengan jumlah petani tambak 95 orang. Kampung kerapu pun menjadi salah satu sentra ekonomi andalan yang patut diperhitungkan dengan produksi mencapai 6 ton per-Hektarnya untuk masa pemeliharaan 6-8 bulan.

Berbagai program Gemerlap yang dijalankan masyarakat terbukti memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai penghargaan pun telah diraih oleh Kabupaten Lamongan. Kesuksesan ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan, pendapatan per kapita warga Lamongan pada 2011 baru Rp 11,3 juta per tahun dengan PDRB Rp 13,4 triliun. Pada 2013, nilainya naik menjadi Rp 15 juta per tahun dengan PDRB Rp 17,6 triliun.

Peningkatan kondisi ekonomi itu memberikan dampak bagi semakin sejahterahnya masyarakat. Ini jika dilihat dari tingkat kemiskinan yang menurun signifikan, yakni dari 18,7 persen pada 2011 menjadi 14,5 persen pada 2013. Begitu pula indeks pembangunan manusia (IPM) naik menjadi 71,42 pada 2013 dari 70,52 pada 2011. (yn/dbs)

DI LAMALERA, SEGALANYA TENTANG PAUS

Musim kemarau di Lamalera yang terletak di Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) lebih panjang dibandingkan musim penghujan. Akibatnya warga pun tak terlalu banyak berharap dari perkebunan. Di tengah kondisi geografis itu, Paus menjadi harapan hidup warga Lamalera.

Saya tiba di Lembata - salah satu pulau dalam gugusan Flores Nusa Tenggara Timur (NTT) – saat kemarau melanda. Panas terik matahari begitu terasa di dalam kabin mobil berganda milik Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat yang mengantar saya ke penginapan. Sepanjang perjalanan, Kepala Dinas KKP setempat, AA. Amuntoda bercerita tentang rumput dan pepohonan yang banyak terbakar disisi kanan dan kiri jalan. Kebakaran itu menurutnya dikarenakan pengendara mobil atau motor yang membuang rokok secara sembarangan. Namun pohon dan rumput yang terbakar bisa juga kesengajaan yang dilakukan oleh para pemburu rusa.

Jalan yang tandus berdebu terus kami lewati. Pun halnya dengan sungai yang surut. Amuntoda terus melanjutkan ceritanya kepada saya. Dikatakannya, jika saja saya datang dalam musim penghujan, maka

kondisinya akan berbeda jauh. Alam Lembata yang berkontur pegunungan bersanding dengan lautan akan lebih tampak seperti alam Eropa. Tetapi saya terus menghibur diri dan mengatakan kepada Amuntoda, jika musim penghujan tiba tentu saja tidak sampai Lembata. Sebab, perjalanan saya dimulai dari Kupang dengan menggunakan Ferry menuju pelabuhan Lewoleba. Berlayar ketika musim penghujan tentu mengundang risiko besar. Dan saya tak akan melakukannya.

30 menit pun berlalu dalam mobil DKP. Saya tiba di penginapan. Amuntoda menyarankan untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum memulai perjalanan pada esok hari menuju Lamalera, sebuah desa yang melestarikan perburuan paus. Sembari istirahat saya menyempatkan diri browsing tentang Lembata. Meski sinyal internet lewat modem lelet, toh saya bisa mendapatkan gambaran akan Lembata.



Dari penginapan, saya juga sempat bertanya kepada staff penginapan akan sebuah gunung yang tampak. Dikatakannya itu adalah gunung Ile Ape dengan ketinggian mencapai 1.319 meter diatas permukaan laut. Dari staff itu pula saya mengetahui bahwasanya mayoritas penduduk Lembata menganut agama Katolik, sebagian lainnya menganut agama Islam, Protestan, Hindu dan Budha. Meskipun demikian masyarakat Lembata masih menaruh kepercayaan terhadap leluhur dan *lera wulan tanah ekan* berupa ritual adat dan pemberian sesajian sebelum melakukan kegiatan tertentu.

Hal ini sempat saya rasakan ketika saya disambut oleh Amuntoda di pelabuhan Lewoleba. Saya sempat disuguhkan legen. Warga setempat menyebutnya sebagi tuak manis. Tuak yang belum dikasih campuran ragi sehingga alkoholnya belum ada. Meski begitu, jika diminum terlalu banyak akan memabukkan juga. Saya disuguhkan batok kelapa yang dituangkan legen. Amuntoda menyuruh saya menuangkan sebagian legen itu ke bumi (baca: tanah) sebelum meminumnya. Hal itu dilakukan sebagai penghormatan kepada leluhur. Di Lembata, tak ada pesta di kampung tanpa legen.

Kisah Lembata hasil browsing, pengamatan dan obrolan dengan banyak orang tersebut akhirnya mengiringi istirahat saya. Lembata yang panas di siang hari ternyata cukup dingin kala malam tiba. Saya tidur cukup nyenyak, hingga suara handphone, panggilan dari Amuntoda membangunkan saya. Bak dikejar setan, saya buru-buru mandi dan berkemas demi janji menuju Lamalera. Lamalera jauh dijangkau dari Lewoleba, ibukota Kabupaten Lembata. Menuju kesana harus memintas banyak bukit dengan jalan yang rusak. Dengan kendaraan yang sama ketika Amuntoda menjemput,

kami membutuhkan waktu selama 4 jam untuk tiba di Lamalera, sebuah desa yang tergantung pada paus, mamalia terbesar di lautan.

Masuk ke Lamalera anda akan disambut gapura desa yang terdapat gambar pausnya. Warga setempat menyebut paus sebagai kotoklema. Sepanjang Mei hingga Oktober adalah musim dimana paus berjenis sperma bermigrasi dari Samudera Pasifik melewati Laut Banda, Laut Flores masuk Laut Sawu melalui perairan Pulau Alor dan ke Samudera Hindia di Selatan Sumba atau sebaliknya. Jika musim itu tiba banyak warga Lamalera yang bersiaga di atas bukit untuk melihat kedatangan paus. Kalau ada semburan air di tengah lautan – sebagai pertanda kedatangan paus – mereka akan segera meneriakkan Baleo!! Baleo!! Nah, kalau sudah begitu warga desa pun akan berduyun-duyun melayarkan perahunya ke laut Sawu secara berkelompok.

Satu kelompok bisa terdiri dari 5 hingga 10 perahu. Dalam satu perahu ada pembagian tugas dan jabatan. Diantaranya Lamuri yang memegang kendali perahu atau juru mudi, Matros untuk sebutan kru perahu dan Lamafa yang berdiri di ujung perahu dan menombak paus. Paus yang berhasil ditombak akan diseret ke pantai. Dagingnya dibagikan ke seluruh desa, bahkan ada pula yang menyimpannya untuk persediaan selama setahun. Bagi yang berlebih bisa juga membarternya dengan hasil kebun di desa tetangga. Umumnya, warga Lamalera mengeringkan daging paus atau mengasapnya.

Dengan cara itu minyak paus akan



didapat. Minyak paus dipercaya memiliki khasiat bagi kesehatan, khususnya untuk menyembuhkan

penyakit dalam. Warga

Lamalera juga percaya minyak paus ampuh sebagai pembersih lambung dan saluran pencernaan. Tidak hanya minyak yang diambil dari tubuh paus. Gigi dan tulangnya ikutan diambil untuk dibuat sebagai aksesoris dan dijual pada wisatawan.

Wisatawan memang kerap dijumpai ketika musim paus tiba. Mereka tertarik akan adat dan budaya di Lamalera. Bayangkan, sejak era 1600-an sebelum berburu paus para warga harus mengikuti upacara keagamaan terlebih dahulu. Portugis mencatat, Suku Wujon yang tinggal di gunung akan turun ke pantai dan berdoa memanggil paus. Kini, upacara keagamaan dilakukan dengan cara Kristen. Saat musim paus, semua masyarakat Lamalera akan berdoa untuk keselamatan nelayan yang akan pergi ke laut dan berdoa untuk mereka yang meninggal di laut.

Tarian khas berburu paus juga ikut digelar. Dengan menggunakan busana tradisional atau sarung dan topi khas setempat, seorang Lamafa

BUDAYA



memimpin tarian diikuti Lamuri serta Matros yang menggunakan dayung kayu. Pada akhir tarian, biasanya Lamafa akan menombak replika paus yang terbuat dari styrofoam. Tarian setempat tak hanya soal berburu paus. Ada pula tarian yang menggambarkan bagaimana kaum perempuan Lamalera harus membersihkan daging paus, menjemurnya, membagi kepada keluarga dan menjajakan atau membarternya di pasar tradisional.

Warga Lamalera juga memiliki pantangan untuk membunuh paus berjenis paus biru atau *blue whales*. Dalam kepercayaan mereka, paus biru disebut pernah menolong leluhur mereka. Yang lebih mencengangkan, paus jenis ini ternyata sangatlah langka dan dilindungi. Pantangan membunuh paus yang hamil, betina dan anak-anak pun masih diterapkan. Mereka hanya membunuh paus jantan terbesar yang merupakan pimpinan kelompok. Hal ini bukanlah mengada-ada. Menurut mereka, jika paus jantan terbesar yang merupakan pimpinan tak dibunuh, paus itulah yang justru bisa membunuh mereka.

Dalam dunia hewan, jantan terbesar dalam kelompok disebut alpha male. Alpha male lah yang melindungi setiap kelompoknya. Bayangkan kalau anggota kelompoknya yang dibunuh? Tentu Alpha Male lah yang akan balik menyerang para pemburunya. Sebaliknya jika Alpha male yang diburu, tentu anggota kelompoknya akan kocar-kacir. Namun, bukan berarti perburuan jantan terbesar akan berlangsung mulus. Seorang pemburu pernah menceritakan bagaimana lamanya menewaskan jantan terbesar. Saking lamanya perahunya pernah dibuat hancur dan sorang krunya juga dihantarkan ke alam baka. Ia juga pernah berkisah bagaimana seorang temannya bisa terbawa sampai perairan Australia karena begitu kuatnya jantan terbesar. Untuk bertahan hidup, teman itu hanya menggantungkan diri pada pecahan kapal dan mengkonsumsi pakaiannya sendiri.

Walau risiko yang mengintai begitu besar, tetap saja para pemburu paus tak pernah kapok. Apalagi pemerintah kabupaten begitu mendukung atraksi budaya ini. Pemerintah Kabupaten seperti

dikemukakan Bupati Eliezer Yance Sunur menyebut bahwa pihaknya tak melarang perburuan paus yang dilakukan warga Lamalera. Ia menilai apa yang dilakukan warganya tidaklah seberapa dibanding yang dilakukan oleh nelayan Jepang. Nelayan Jepang, selama ini berburu paus secara massal menggunakan peralatan canggih hingga ke belahan dunia manapun. Paus oleh Pemkab Lembata, bahkan sudah menjadi ikon Lembata. Di lambang Pemkab, anda akan menjumpai bentuk paus. Sarung-sarung tenun setempat motifnya paus pula.

Di Lamalera saya sempat mencicipi rasa daging paus yang dioseng dengan kecap. Bau daging paus terasa apek bagi saya yang pemula. Minyaknya pun terus menyangkut di tenggorokan. Adapun tekstur dagingnya ketika digigit layaknya kita menggigit kikil sapi. Namun bagi warga Lamalera, tak ada hidangan yang berkelas dan senikmat paus. Paus, sekali lagi telah membantu mereka dalam hidup di tengah kerasnya alam Lamalera. Bahkan bisa menyekolahkan anak mereka hingga bangku kuliah. **PS**



ENDE, SEJARAH PANCASILA DAN INDAHNYA KELIMUTU

Ketika mendengar nama Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) hal pertama yang diingat adalah tempat pengasingan Soekarno, Presiden RI yang pertama dan Danau Tiga Warna atau kelimutu, ya kedua hal tersebut telah menjadi ikon Ende.

Menyusuri jejak sejarah pengasingan Bung Karno di Ende tentunya harus dimulai dari tempat tinggal Bung Karno. Tempat tersebut kini telah menjadi objek wisata sejarah yang wajib dikunjungi ketika datang ke Ende. Sebuah rumah sederhana dimana Bung Karno

beserta istri dan mertuanya tinggal selama 4 tahun.

Rumah sederhana yang beratap seng, bercat putih dengan jendela dan pintu kayu warna kuning serta hiasan bergaris hijau tersebut telah menjadi saksi bisu perjalanan bangsa Indonesia dalam menggapai kemerdekaannya. Dari tampilan luar,

rumah tersebut tidak terlalu besar dan halamannya juga tidak terlalu luas. Namun secara keseluruhan, tampak asri dan masih menyisakan rimbunan pohon di samping rumah.

Selama 4 tahun (1934-1938) Bung Karno dan keluarga menempati rumah tersebut, dan hingga saat ini rumah tersebut tidak banyak



berubah dari bentuk aslinya yang dibangun pada tahun 1927, kecuali atapnya saja diganti karena bocor. Dan sejak tahun 1954 rumah ini resmi menjadi museum yang sebelumnya yaitu pada tahun 1952 dijadikan kantor Sosial darah Flores dan tempat bersidang DPRD Flores.

Rumah yang terletak di jalan Perwira, konon dahulunya milik H. Abdullah Ambuwaru yang kemudian dikontrak oleh Bung Karno. Luas bangunannya 9 x 18 m², memiliki tiga kamar yang berderet di sisi kanannya. Satu kamar tidur untuk Bung Karno, satu kamar untuk Ibu Inggit bersama Ibu Amsih, dan satu kamar lagi untuk ruang tamu.

Setelah mengisi buku tamu dan membayar uang Rp.2.500,- serta melewati pintu berdaun ganda. Di ruang tamunya terdapat kursi rotan dan satu meja bundar yang biasa Bung Karno gunakan untuk menjamu tamunya. Di dinding rumah

tergantung lukisan sosok Soekarno karya Affandi yang mulai pudar. Ada pula lukisan Pura Bali yang dibuat Bung Karno tahun 1935. Beberapa foto Bung Karno bersama keluarga dan teman-temannya terpajang juga.

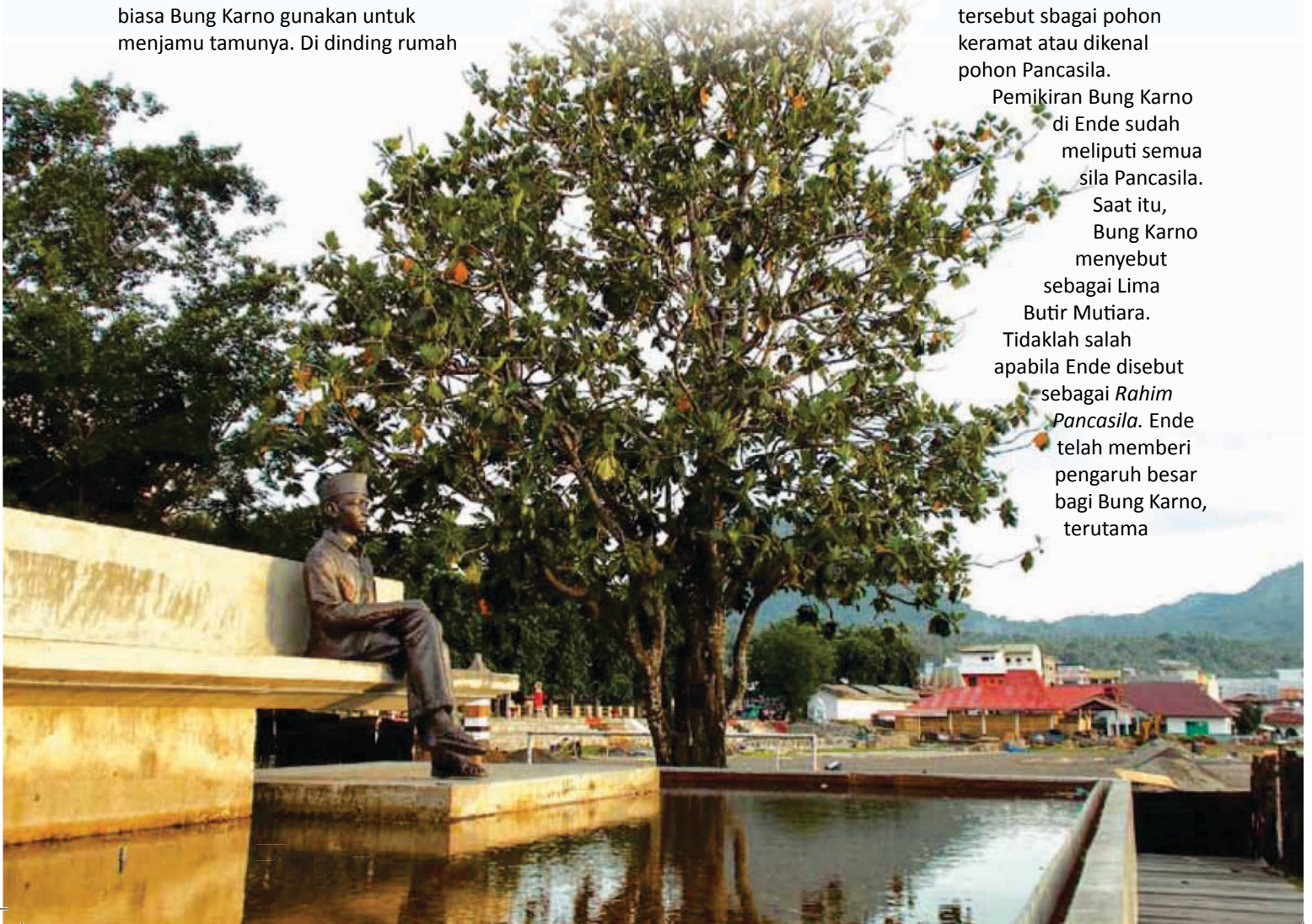
Di sebuah lemari kaca ada dua tongkat kayu berkepala kera yang biasa dibawa Bung Karno. Tongkat tersebut digunakan Bung Karno apabila bertemu dengan Pemerintah Hindia Belanda. Bung Karno tidak membalas hormat penguasa Hindia Belanda dengan anggukan tetapi dengan mengarahkan tongkatnya yang berkepala kera. Cara ini sebagai simbol bahwa sifat penjajah hanya bisa dihargai oleh binatang dan tidak oleh sesama manusia.

Dalam lemari kaca juga tersimpan naskah tonil karya Bung Karno dalam map berwarna oranye. Selama di Ende, Bung Karno menghasilkan 13

naskah tonil, diantaranya adalah: *"Dokter Setan"*, *"Aero Dinamik"*, *"Jula Gubi"*, dan *"Siang Hai Rumbai"*. *"Rahasia Kelimutu"*, *"Tahun 1945"*, *"Nggera Ende"*, *"Amuk"*, *"Rendo"*, *"Kutkutbi"*, *"Maha Iblis"*, dan *"Anak Jadah"*. Naskah-naskah tonil tersebut digunakan Bung Karno untuk mengobarkan semangat rakyat merebut kemerdekaan

Berjarak sekitar 100 Meter dari rumah pengasingan Bung Karno, terdapat pohon sukun yang terelatak dilapangan Pancasila (dahulu namanya lapangan Perse) serta menghadap kelaut. Dibawah pohon sukun tersebut, sambil mengamati daun sukun yang bergigi lima serta memiliki jumlah cabang lima pula, konon Bung Karno menemukan inspirasi dasar Negara Indonesia atau Pancasila, dan hingga saat ini orang disekitar menganggap pohon sukun tersebut sbagai pohon keramat atau dikenal pohon Pancasila.

Pemikiran Bung Karno di Ende sudah meliputi semua sila Pancasila. Saat itu, Bung Karno menyebut sebagai Lima Butir Mutiara. Tidaklah salah apabila Ende disebut sebagai *Rahim Pancasila*. Ende telah memberi pengaruh besar bagi Bung Karno, terutama



kerukunan hidup antarumat beragama di Ende.

Sebagai penanda bahwa tempat tersebut merupakan tempat yang bersejarah, pemerintah membangun patung Bung Karno yang sedang duduk dibawah pohon sukun dan menghadap kelaut. Patung tersebut seolah menggambarkan perenungan Bung Karno tentang dasar Negara Republik Indonesia atau yang dikenal Pancasila. Jadi tempat ini 'wajib' dikunjungi apabila berwisata ke Ende.

PESONA KELIMUTU

Setelah puas menikmati napak tilas lahirnya Pancasila, ada baiknya rehat sejenak dengan menikmati pesona keindahan Danau Kelimutu atau danau Tiga warna. Kelimut berasal dari asal kata 'keli' yang artinya gunung dan 'mutu' yang berarti mendidih, danau ini adalah kawah yang terdapat di Gunung Kelimutu.

Danau yang terletak di zona inti Taman Nasional Kelimutu ini, terdiri dari tiga buah danau yaitu, Tiwu Ata Polo, Tiwu Nuamuri Koo Fai, dan Tiwu Ata Mbupu. Yang unik, ketiganya memiliki warna yang berbeda-beda, yaitu merah, biru, dan putih.

Keunikan warna itulah yang membuat para wisatawan mengunjungi obyek wisata ini. Danau ini terletak di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, NTT. Untuk mencapai danau ini, wisatawan harus menempuh perjalanan sekitar 45 km dari Ende atau 13 km dari Kampung Moni.

Untuk menikmati indahnya danau tersebut, wisatawan hanya membayar retribusi sebesar Rp 2.000. Jalan masuk menuju tepi danau berupa anak tangga dan jalan bebatuan ditempuh dengan berjalan kaki. Waktu paling baik untuk mengunjungi Danau Tiga Warna adalah pagi hari.

Selain keindahan alam yang membuat decak kagum siapa pun



yang melihatnya, Danau Tiga Warna juga sampai saat ini masih lekat dengan legenda yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Menurut kepercayaan penduduk setempat, warna-warni danau ini memiliki arti masing-masing dan memiliki kekuatan alam yang sangat dahsyat.

Warna Biru atau "Tiwu Nuwa Muri Koo Fai" diyakini oleh penduduk setempat menjadi tempat berkumpulnya orang-orang meninggal di usia muda. Warna Merah atau "Tiwu Ata Polo" diyakini menjadi tempat berkumpul arwah orang-orang yang semasa hidupnya sering melakukan perbuatan jahat. Sedangkan Warna Putih atau "Tiwu Ata Mbupu" diyakini oleh warga desa sebagai tempat berkumpulnya arwah-arwah leluhur mereka yang meninggal ketika mereka tua.

Selain itu, masyarakat setempat percaya bahwa danau tersebut adalah danau keramat dan memberikan kesuburan pada daerah sekitarnya. Maka tak jarang sering diadakan upacara adat di danau tersebut di mana masyarakat memberikan persembahan hasil bumi kepada arwah di danau tersebut.

Selain memiliki danau, Gunung Kelimutu juga menyimpan pesona flora dan fauna yang tidak kalah menarik. Di sekeliling gunung, wisatawan dapat menemukan tumbuh-tumbuhan yang jarang ditemukan di wilayah Flores lainnya seperti pinus, cemara, kayu merah dan edelweis. Sedangkan ragam fauna yang terdapat di hutan Kelimutu adalah rusa, babi hutan, ayam hutan, elang dan lain-lain.

Saat ini Gunung Kelimutu banyak dikunjungi sebagai obyek wisata trekking. Untuk memulai trekking ke Gunung Kelimutu, Anda dapat melakukannya dari Desa Moni menggunakan kendaraan truk sejauh kira-kira 13 km untuk sampai di bibir danau.

Di sekitar danau terdapat pondok jaga, tempat berteduh untuk wisatawan, dan toilet, serta beberapa losmen kecil bagi para wisatawan yang hendak menginap, juga beberapa restoran. Perlu diketahui bahwa waktu terbaik untuk mengunjungi Danau Tiga Warna adalah bulan Juli dan Agustus. Jadi tunggu apa lagi ayo kita ke Ende.

(DAM)

Dasar Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
7 TAHUN 2014

Untuk

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM SIMPANAN KELUARGA
SEJAHTERA, PROGRAM INDONESIA PINTAR,
DAN PROGRAM INDONESIA SEHAT UNTUK
MEMBANGUNKAN KELUARGA PRODUKTIF

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program perlindungan sosial melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat, dengan ini menginstruksikan:

Kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Kesehatan;
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Menteri Sosial;
9. Menteri Agama;
10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
11. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
12. Jaksa Agung;
13. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
15. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
16. Kepala Badan Pusat Statistik;
17. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
18. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
19. Para Gubernur;
20. Para Bupati/Walikota.

PERTAMA: Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.

KEDUA

Khusus kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:
 - a. meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan pengawasan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat;
 - b. penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat, dengan melibatkan Menteri terkait, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat pada Kementerian/ Lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
 - d. melaporkan kepada Presiden atas pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan:
 - a. meningkatkan koordinasi kebijakan politik, hukum, dan keamanan terkait dengan pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat;
 - b. meningkatkan koordinasi dan evaluasi perkembangan politik, hukum, dan keamanan terkait dengan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat pada Kementerian/ Lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan perencanaan dan penganggaran Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat.
4. Menteri Dalam Negeri:
 - a. meningkatkan pemberian fasilitasi dan dukungan kebijakan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat;
 - b. mendorong Gubernur dan/ atau Bupati/ Walikota untuk berperan aktif menjalankan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat di daerahnya masing-masing.
5. Menteri Keuangan menyediakan, mengalokasikan, dan melakukan pengendalian anggaran untuk pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menteri Kesehatan:
 - a. meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam:
 - 1) menetapkan sasaran Program Indonesia Sehat yang juga merupakan Penerima Bantuan Iuran;
 - 2) membayarkan Iuran kepada Penerima Bantuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
 - 3) menyediakan dan memperbaiki fasilitas kesehatan dalam rangka pelaksanaan Program Indonesia Sehat.
 - b. melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program Indonesia Sehat;
 - c. menjadi Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Program Indonesia Sehat; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan Program Indonesia Sehat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penetapan sasaran Program Indonesia Pintar;
 - b. menyediakan Kartu Indonesia Pintar sejumlah Penerima Program Indonesia Pintar untuk siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. membayarkan manfaat Program Indonesia Pintar beserta tambahan manfaat lainnya kepada siswa Penerima Program Indonesia Pintar yang berada di sekolah yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program Indonesia Pintar;
 - e. menjadi Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Program lingkup Kementerian Kebudayaan; dan Indonesia Pintar di Pendidikan dan
 - f. melaporkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

8. Menteri Sosial:
 - a. meningkatkan koordinasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam penetapan sasaran Program Simpanan Keluarga Sejahtera;
 - b. menyediakan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera sejumlah penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera;
 - c. mendorong Dinas Sosial Kabupaten/ Kota untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran data Kartu Perlindungan Sosial sebelumnya;
 - d. menyalurkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera melalui mekanisme penggunaan Layanan Keuangan Digital dan Rekening Giro Pos;
 - e. melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera;
 - f. menjadi Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
9. Menteri Agama:
 - a. meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam penetapan sasaran Program Indonesia Pintar;
 - b. menyediakan Kartu Indonesia Pintar sejumlah penerima Program Indonesia Pintar untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah;
 - c. membayarkan manfaat Program Indonesia Pintar beserta tambahan manfaat lainnya kepada siswa penerima Program Indonesia Pintar yang berada di sekolah yang dikelola Kementerian Agama;
 - d. melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program Indonesia Pintar;
 - e. menjadi Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di lingkup Kementerian Agama; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
10. Menteri Komunikasi dan Informatika:
 - a. meningkatkan koordinasi dengan badan regulasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menjamin:
 - 1) penyelenggara jasa telekomunikasi melakukan pendaftaran massal nomor dan Kartu SIM (Subscriber Identity Module) prabayar Keluarga untuk Program Sejahtera melalui Simpanan Layanan Keuangan Digital; dan
 - 2) memberlakukan nomor dan Kartu SIM (Subscriber Identity Module) prabayar selama pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera melalui Layanan Keuangan Digital berjalan.
 - b. meningkatkan koordinasi pelaksanaan sosialisasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat secara nasional.
11. Menteri Badan Usaha Milik Negara:
 - a. menugaskan Bank Badan Usaha Milik Negara menjadi pelaksana penyaluran bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera dengan menggunakan Layanan Keuangan Digital;
 - b. menugaskan PT. Pos Indonesia (Persero) menjadi pelaksana penyaluran bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera dengan menggunakan Giro Pos.
12. Jaksa Agung:
 - a. memberikan advokasi kepada Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan penyelewengan;
 - b. mempercepat proses penyelesaian perkara penanganan dan yang berhubungan

- an dengan penyimpangan dan penyelewengan pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat.
13. Panglima Tentara Nasional Indonesia memberikan dukungan dan bantuan pengamanan pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat.
 14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:
 - a. meningkatkan kegiatan kepolisian yang bersifat pre-emptif (bimbingan dan penyuluhan) kepada masyarakat khususnya penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan penyelewengan;
 - b. mempercepat penanganan dan penyelesaian proses hukum bagi pelaku penyimpangan dan penyelewengan pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat.
 15. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan serta mengambil langkah-langkah pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas penyelenggaraan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat.
 16. Kepala Badan Pusat Statistik melaksanakan pemutakhiran Basis Data Terpadu melalui pendataan rumah tangga penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat.
 17. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - a. melaksanakan advokasi kepada Kementerian/ Lembaga dalam proses pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat;
 - b. merumuskan prosedur penugasan langsung kepada pihak terkait pengadaan barang/jasa untuk pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga.
 18. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan:
 - a. menyediakan Kartu Indonesia Sehat sejumlah Penerima Bantuan Iuran;
 - b. meningkatkan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berkaitan dengan penyediaan Kartu Indonesia Sehat; dan
 - c. meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terkait pelaksanaan Program Kartu Indonesia Sehat.
 19. Para Gubernur beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat di daerah masing-masing.
 20. Para Bupati/Walikota beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat di daerah masing-masing.
- KETIGA : Pembiayaan pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang tidak mengikat yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Banyak Harapan, Banyak Cara

Kewirausahaan di tanah air dipercaya mampu jadi potensi besar pendapatan ekonomi dalam negeri secara merata. Didorong juga agar terus membudaya.



Presiden Joko Widodo dengan resmi membuka Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) 2015 di Jakarta pada pertengahan Maret lalu. GKN tahun 2015 ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi berbagai pihak untuk memasyarakatkan budaya berwirausaha di tengah masyarakat.

Acara yang juga dihadiri oleh Menko PMK, Puan Maharani,

ini selanjutnya menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap sektor UMKM di tanah air dengan rencana untuk fokus dalam pendampingan kepada para pelaku wirausaha agar mampu naik kelas menjadi usaha dengan skala yang lebih tinggi.

Kementerian Koperasi dan UKM selaku pelaksana program GKN 2015 ini mengaku akan fokus pada pelatihan yang menasar para pelaku

usaha pemula dan juga mereka yang tengah menjalankan usahanya.

Menkop dan UKM, AAGN Puspayoga, mengatakan, pelatihan yang akan diberikan akan menekankan pada keterampilan manajemen keuangan dan SDM. Pelatihan yang diberikan itu juga diusahakan sejalan dengan program pemerintah pusat yang bertekad mewujudkan swasembada pangan.

“Pelatihan diutamakan pada

keluarga petani dan nelayan. Jadi, tidak semata-mata pelatihan diberikan pada wirausahawan pemula yang selama ini berjalan baik, tapi juga pada yang sudah menjalankan usaha,” ujar Puspayoga lagi.

Kemenkop dan UKM, lanjut Puspayoga, tidak mengejar pertumbuhan ekonomi semata dan tidak akan mengabaikan pemerataan kesejahteraan para pelaku UKM dan koperasi di tanah air.

Menurut Deputi bidang Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM, Prakoso Budi Susetio, selain memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha perikanan dan pertanian, Kemenkop dan UKM juga akan memberikan pengetahuan dan mempermudah akses ke lembaga permodalan. “Jadi, kami tidak hanya melatih tetapi juga memberikan pengetahuan atau informasi, seperti akses pasar, akses permodalan dari KUR BRI, LPDB KUKM, dan sebagainya.”

Prakoso mengungkapkan, sejak program pelatihan kewirausahaan di kementeriannya diterapkan, sudah berhasil dilahirkan wirausaha-wirausaha baru di antaranya pada 2012 sebanyak 189 wirausaha pemula, kemudian pada 2013 sebanyak 3.860 wirausaha dan pada 2014 ada 4.326 wirausaha pemula.

WIRAUSAHA SOSIAL

Istilah wirausaha memang begitu identik dengan kegiatan usaha yang kemudian disebut dengan UMKM. Selain semangat untuk mandiri secara finansial, kewirausahaan yang baik tentu memiliki niat untuk menyejahterakan pula masyarakat di sekitar lokasi usaha. Wirausaha yang mengedepankan aspek manfaat bagi masyarakat sekitar itu yang kemudian dikenal dengan wirausaha sosial.

Adalah Dalu Nuzlul Kirom yang kemudian mengusung bentuk usaha sosial Pemberdayaan Masyarakat Eks Lokalisasi Dolly, Surabaya, Jawa Timur. Berbasis usaha jenis wisata dan kuliner, wirausaha sosial ini kemudian mengganjar Dalu dengan penghargaan untuk kategori Pariwisata dan Kreatif Wirausaha Mandiri 2015.

Dolly yang dikenal sebagai basis prostitusi di Kota Surabaya ini, diubah wajahnya oleh Dalu sebagai Tim Melukis Harapan. Dalu pun memiliki tim yang solid dengan 80 orang penggerak bidang sosial dan terdiri dari mahasiswa dan serta beberapa profesi di dalamnya.

Dalu menjelaskan, dalam wirausaha bentuk sosial yang dilakukan timnya di Dolly ini sebagai sarana melatih para mantan pekerja seks komersil (PSK), serta warga di lingkungan sekitar untuk mengubah wajah lingkungan prostitusi menjadi basis industri rumahan.

“Yang kami janjikan bukan pendapatan, tapi untuk mengubah sejarah di wilayahnya. Kami berhasil mengajak ketua RT (Rukun Tetangga) yang kontra dengan Bu Risma (Wali

Kota Surabaya) dan akhirnya ikut dengan kami. Selain itu, kami juga mengajak mucikari,” ungkap Dalu seperti dikutip dari *metrotvnews.com*.

Perubahan wajah yang dilakukan adalah dengan menjadikan Dolly sebagai basis produksi industri kreatif dan sentra kuliner. Industri yang sudah jalan saat ini seperti batik, panganan kue kering, telur asing, nugget, sabun, makanan-makanan umum dan lainnya.

“Sebelum ditutup, perputaran uang dilokalisasi Dolly hingga Rp1,2 miliar sampai Rp2 miliar. Bisnisnya seperti prostitusi dengan 1.500 PSK, narkoba, karaoke, tukang parkir, laundry, warkop, dan sebagainya. Sulit untuk mengajak mereka semua, karena yang kami cari adalah yang mau berubah,” ujar Dalu lagi.

Dalu mengungkapkan, yang dicari dalam kegiatan ini adalah modal sosial untuk mengubah wajah negatif pandangan masyarakat menjadi lebih baik. “Sampai detik ini yang kami cari adalah modal sosial, sehingga yang kami hasilkan adalah konsekuensi sosial bukan profit. Itu yang diutamakan.” (IN)



AGAR MASYARAKAT DUNIA LEBIH SIAP HADAPI BENCANA

Masyarakat dapat dilibatkan dalam upaya mengurangi berbagai risiko akibat hantaman bencana. Tidak selalu berawal dari kebijakan pemerintah.



PBB di pertengahan Maret ini kembali menggelar konferensi dunia untuk ketiga kalinya dalam upaya mengurangi berbagai risiko akibat bencana alam (WCDRR) di Sendai, Jepang. Indonesia lalu mengutus Wapres, Jusuf Kalla, dan didampingi oleh Menko PMK, Puan Maharani.

WHO dalam pertemuan dunia ini diketahui telah menyusun

sejumlah kerangka kebijakan yang bertujuan membantu para pemimpin negara untuk mengelola risiko darurat bencana secara lebih efektif dan mengurangi dampak kesehatan yang timbul akibat bencana itu. Kerangka kebijakan ini disusun dengan dilatarbelakangi oleh pemahaman dan kesadaran bersama bahwa betapa pentingnya suatu sistem peringatan dini terhadap

ancaman bencana yang dapat terjadi kapan saja.

WHO dalam kesempatan ini juga meluncurkan suatu kerangka kerja keselamatan komprehensif untuk mengurangi kerusakan akibat bencana yang dialami oleh sistem layanan kesehatan dan infrastruktur pendukungnya.

"Inisiatif keselamatan rumah sakit adalah tentang bagaimana

menyelamatkan suatu fasilitas kesehatan. Inisiatif ini juga diusulkan untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan masih dapat dengan mudah dijangkau masyarakat dan dapat berfungsi dengan baik pascaterjadinya bencana,” papar Asisten Dirjen bidang Kegawatdaruratan WHO, Bruce Aylward, seperti dikutip dari kantor berita Irlandia, IRNA.

“Topan Haiyan di Filipina dan krisis wabah Ebola di Afrika Barat telah menyoroti pentingnya kesehatan manusia untuk tujuan kolektif kita dalam mengurangi risiko bencana bersama dengan semua sektor.”

Adapun bagian dari inisiatif itu adalah Indeks Keselamatan Rumah Sakit yang nantinya akan menyediakan bantuan cepat terutama berbagai langkah keamanan dan kesiapan penting rumah sakit yang akan beroperasi dalam situasi gawat darurat.

Dalam skala besar, rumah sakit semacam itu akan menangani korban bencana alam seperti gempa bumi atau banjir yang jumlahnya mencapai setengah dari populasi yang ada. Selain respon cepat dan ketersediaan layanan kesehatan penting, rumah sakit juga diharapkan menyediakan layanan imunisasi untuk mengantisipasi ancaman wabah penyakit.

Sebagai bagian dari inisiatif keselamatan rumah sakit, sekitar 79 negara telah melakukan berbagai tindakan dalam kurun 20 tahun terakhir untuk membangun suatu rumah sakit yang tidak hanya mumpuni dalam melayani saat terjadi bencana tetapi juga infrastrukturnya kuat dari hantaman bencana.

Yang menarik dari pertemuan dunia itu selanjutnya adalah diluncurkannya indeks risiko bencana dan populasi dunia. Indeks ini merupakan parameter dunia untuk

menciptakan suatu lingkungan yang aman dan nyaman bagi kaum lansia. Menurut indeks yang disusun oleh *HelpAge* ini, negara-negara Uni Eropa dan AS masih berada di urutan teratas dalam menyediakan berbagai fasilitas yang aman dan nyaman bagi para lansia, sementara negara-negara di kawasan Asia masih banyak yang perlu dibenahi.

Kendati demikian, peserta pertemuan sepakat untuk melibatkan lebih banyak pihak dalam upaya mengurangi risiko yang timbul akibat bencana, termasuk kalangan lansia. Selama ini, lansia dinilai hanya sebagai korban yang paling merasakan dampak bencana selain anak-anak. Peran mereka saat terjadi bencana nyaris tidak ada, maka tidak salahnya bila kini peran itu diupayakan lebih aktif terutama untuk langkah antisipasi demi mengurangi risiko bencana.

Pada tahun 2012 di Pakistan misalnya, setelah mendapatkan aneka pelatihan antisipasi bencana dan mengikuti stimulasi keselamatan diri, para lansia jadi paham benar apa yang seharusnya mereka lakukan jauh hari sebelum bencana terjadi. Mereka langsung melapor pihak otoritas manajemen bencana setempat begitu melihat warna air sungai yang berubah beberapa saat sebelum bencana terjadi. Peringatan dini bencana pun lalu bergulir ke tengah masyarakat.

Bencana banjir yang dikhawatirkan terjadi, sementara berkat laporan yang diterima sebelumnya, warga telah mengungsi dari lokasi banjir. Karena laporan para lansia itu pula, risiko akibat hantaman banjir bandang mampu berkurang hingga 50 persen.

Sejak beberapa tahun terakhir, Pakistan kerap dilanda banjir terutama saat tiba musim hujan. Begitu juga dengan ancaman gempa bumi karena letak geografis Pakistan yang dikelilingi oleh gunung berapi.

Begitu pula dengan wilayah laut yang sangat rentan terhadap bencana Tsunami atau badai, sementara bila tiba musim kemarau, beberapa wilayah akan merasakan dampak kekeringan yang parah. Pakistan juga kini tengah menghadapi polusi lingkungan yang akut karena aktivitas tambang dan penggalian air tanah yang berlebihan.

Menurut Ahli Pembangunan Manusia, Gulmina Bilal Ahmad, perubahan iklim telah membawa dampak yang sangat besar bagi Rakyat Pakistan karena mereka memang tidak pernah dibekali persiapan yang baik ketika suatu bencana terjadi.

“Wanita, lansia, dan penyandang disabilitas merupakan orang-orang yang perlu perhatian dan kebutuhan khusus serta perlu jadi prioritas dalam rencana pembangunan pemerintah terutama ketika dan pascaterjadinya bencana,” kata Ahmad lagi.

Sementara menurut *The Rescue-1122*, semacam penyedia layanan gawat darurat milik pemerintah Pakistan, layanan keselamatan yang disediakan tidak hanya untuk menjalankan misi menyelamatkan kehidupan tetapi juga mengubah pola pikir Rakyat Pakistan. Harapannya, Rakyat Pakistan dapat menjadi suatu komunitas dengan sistem perencanaan, persiapan, respon, dan pencegahan bencana yang baik di masa mendatang.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh *The Rescue-1122* adalah seleksi komunitas masyarakat, membangun hubungan dan pemahaman masyarakat, pembentukan organisasi berbasis masyarakat, pelaksanaan penilaian kapasitas kerentanan daerah, perencanaan dan pelaksanaan strategis serta pemantauan yang efektif dan evaluasi. **(IN)**

ANEKA DALIH NIKAH SIRI ONLINE

Dimulai dari untuk menghindari perzinahan, lalu berkembang menjadi sarana cari nafkah. Tetap saja marak, meskipun justru kaum perempuan yang dirugikan.

A dalah perempuan muda asal Malang, Jawa Timur, berinisial MG yang menuturkan kisahnya kepada salah satu situs berita *online* tentang keputusannya menikah siri dengan pelanggan setia di salah satu karaoke tempat MG bekerja. Bermodal 'atas dasar suka sama suka' lengkap dengan koneksi internet, pernikahan secara siri *online* pun terjadi.

"Memang banyak teman-teman perempuan malam yang melakukan nikah siri secara *online* atau nikah siri biasa. 'Kan lebih aman, tidak tergolong zinah jika mau nikah

siri. Tetapi, nikah siri itu dilakukan jika sudah kenal lama, layaknya suami istri. Pria yang sudah sering memberikan uang untuk belanja," ungkap perempuan berusia 21 tahun ini.

MG menceritakan awal perkenalannya dengan laki-laki yang kini menjadi suami sirinya itu. Komunikasi yang intens membuahkan kedekatan hubungan hingga akhirnya berujung pada lamaran.

"Setelah lama kenal, saya diajak oleh pria itu untuk nikah siri biar bisa berhubungan layaknya suami istri karena Si Pria itu sudah punya istri,

begitu juga perempuan, termasuk aku," papar MG lagi yang mengaku menikah siri atas bantuan jasa penghulu yang bersedia menikahkan. Prosesi pernikahan yang tidak berlangsung lama itu digelar secara *online* menggunakan *Skype*.

"Penghulunya sudah yang dikenal dan mengenal kita. Kita tidak harus datang tetapi bisa melalui telepon atau melalui *Skype* antara kedua mempelai dan penghulu. Ada saksi kok. Tapi walinya menggunakan penghulu,"

Adapun kesepakatan yang dibuat dari pernikahan siri *online* itu adalah MG berhak mendapatkan



uang jatah belanja bulanan dan masih diperbolehkan bekerja melayani pelanggannya di tempat karaoke itu. “Tetapi tidak sampai berhubungan intim layaknya suami istri. Hanya boleh berhubungan dengan pria yang menikahi aku secara siri itu,” ungkap MG.

Pengalaman MG dan perempuan muda lain beberapa waktu lalu telah jadi fenomena tersendiri yang akhirnya melahirkan keprihatinan. Sebagian besar pelakunya beralih motif ekonomi, mendapatkan status, atau untuk memenuhi kebutuhan seksual.

Nikah siri, menurut Psikolog Perkawinan dan Keluarga di Jakarta, Widiawati Bayu, sesungguhnya makna pernikahan tidak terbatas hanya urusan milik pasangan pengantin saja tetapi juga seluruh keluarga pasangan. Belum lagi dengan nilai sakral pernikahan yang berlaku di semua agama.

Maka, kemunculan nikah siri secara *online* ini jadi seolah menghapus makna sakral pernikahan tadi. Selain itu, praktik pernikahan siri semacam ini akan membawa banyak dampak merugikan bagi perempuan pelakunya.

“Sebagian perempuan bahkan tidak mempertimbangkan dampak jangka pendek dari pernikahan siri. Walaupun begitu, untung rugi pernikahan siri itu tergantung pada pandangan masing-masing orang karena memang sifatnya sangat personal,” kata Widi lagi.

Fenomena ini juga menuai kritikan dan bahkan kecaman dari kalangan pemuka agama, misalnya dari kiai Nahdlatul Ulama (NU) di Malang. Salah satunya oleh Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang, KH Mujib Syadzili.



Menurut Mujib, Islam memang memperbolehkan nikah siri karena ada beberapa alasan tertentu. Namun, bukan semata-mata menjadi solusi menghindari perzinahan. Nikah siri harus tetap memenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun nikah adalah ada kedua mempelai, wali, dua saksi, ijab dan kabul (akad nikah).

“Mulai dari penghulu, kedua mempelai, wali dan saksi, harus ada dalam di satu tempat. Jika tidak di satu tempat maka tidak sah. Itu menurut mazhab Syafi’i, yang banyak dianut umat Islam di Indonesia. Kita mengkritik dan mengecam praktik nikah siri secara *online* itu,” tegas Mujib kepada *Kompas*.

“NU secara tegas mendukung Pemerintah yang hanya mengakui pernikahan secara resmi tercatat oleh Negara. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah tergour iklan nikah siri *online*. Karena pernikahan siri itu lebih banyak menimbulkan masalah daripada kebahagiaan, terutama bagi perempuan dan anak-anaknya.”

Kementerian agama, melalui Menag, Lukman Hakim Saifuddin, menjelaskan bahwa nikah siri belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, apalagi jika dilakukan secara *online*. Pernikahan siri yang tidak tercatat oleh negara itu akan membawa kerugian besar terutama bagi para perempuan. “Kalau pun pasangan nikah siri bercerai dan memperebutkan harta dari pernikahan, maka negara tidak bisa bersikap. Karena (pernikahan itu---red) tidak dicatat negara.”

Masih kata Lukman, pihaknya pun saat ini telah menadalami maraknya jasa nikah siri secara *online*. Karena menurutnya, nikah siri *online* itu masuk sebagai kategori pidana yakni melakukan penipuan. “Aneh nikah siri *online* menerbitkan buku nikah. Padahal nikah siri itu *nggak* pakai buku nikah,” kata menag lagi. (IN)

“NU secara tegas mendukung Pemerintah yang hanya mengakui pernikahan secara resmi tercatat oleh Negara. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah tergour iklan nikah siri *online*. Karena pernikahan siri itu lebih banyak menimbulkan masalah daripada kebahagiaan, terutama bagi perempuan dan anak-anaknya.”

SIMAYA, BAGIAN DARI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Sejumlah pemerintah daerah telah menerapkan Sistem Administrasi Perkantoran Maya (siMAYA). Apa itu siMAYA dan sudah sejauhmana penerapannya di sejumlah daerah?

Pemerintah menindaklanjuti pencaangan reformasi birokrasi dengan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2015 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road

Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Pada Road Map itu kemudian ditetapkan tujuan program penataan tata laksana yakni meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis proses dan mekanisme kerja atau prosedur dalam sistem manajemen pemerintahan dengan target

meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan serta meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan.

Langkah tersebut juga sebagaimana termaktub dalam isi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, No. 5 Tahun 2013 tentang Penggunaan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik Pada Instansi Pemerintah. Disebutkan dalam surat edaran itu, bahwa pemerintah sudah membuatkan suatu sistem administrasi perkantoran secara elektronik yang terintegrasi.





Sistem itu bernama siMAYA yang penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik dengan memperhatikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.41/PER/MEN. KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.

Sejatinnya, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) termasuk dalam 9 (sembilan) program percepatan reformasi birokrasi. Sembilan program tersebut adalah penataan struktur birokrasi, penataan jumlah, dan distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Sistem Seleksi dan Promosi secara terbuka, Profesionalisasi PNS, Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government), Penyederhanaan Perizinan Usaha, Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur, peningkatan kesejahteraan PNS, Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja PNS. Nah, siMAYA ialah bagian dari Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government).

Dalam instansi pemerintah sendiri terdapat dua metode siMAYA yang biasa digunakan, yakni siMAYA awan dan siMAYA Intra. Melalui

metode siMAYA awan, seluruh pengguna pada instansi pemerintah dapat langsung memanfaatkan lewat internet dengan menggunakan perangkat teknologi informasi atau perangkat komputer bergerak lainnya secara langsung setelah mendapatkan akun (username dan password) siMAYA. Instansi pemerintah tidak harus melakukan investasi dan pemeliharaan infrastruktur dan perangkat lunak. Seluruh kebutuhan infrastruktur dasar dan pengembangan aplikasi dilakukan oleh penyedia, dalam hal ini oleh kementerian yang membidangi komunikasi dan informatika.

Adapun siMAYA Intra, operasionalnya dijalankan melalui instalasi siMAYA pada infrastruktur TIK setiap instansi pemerintah. Pengelola nasional (Kominfo) melakukan sinkronisasi siMAYA intra dengan siMAYA komputasi awan untuk menjamin interkoneksi dan interrelasi antar siMAYA intra pada seluruh instansi pemerintah. Untuk bisa memakai layanan siMAYA setiap pegawai mesti mempunyai akun siMAYA sesuai dengan struktur organisasinya. Akun ini dikelola oleh pengelola instansi pemerintah. Tanpa menggunakan akun, pegawai tidak bisa memanfaatkan fitur-fitur siMAYA.

Secara umum, siMAYA memiliki banyak keunggulan yang diantaranya meningkatkan efektifitas kerja, terutama menyangkut pendistribusian serta menghindari tercecer atau hilangnya surat. Dimana dengan pemanfaatan sistem ini, pengiriman dan pengecekan sudah sampai sejauh mana proses surat tersebut dapat dilakukan setiap saat tanpa harus mendatangi langsung instansi yang menjadi tujuan pengiriman surat. Sehingga dapat mengefisiensi waktu, tenaga, dan biaya. siMAYA juga bisa diakses melalui smartphone, dengan begitu mempercepat proses pengambilan keputusan maupun pemberian pelayanan publik tanpa harus berada di kantor karena siMAYA dapat diakses dimana saja walaupun pimpinan tidak ada di tempat dan tanpa memberikan disposisi kepada pejabat yang ditunjuk karena semua pejabat diberikan akun siMAYA.

Hingga kini sejumlah pemerintah daerah mulai menerapkan siMAYA seperti Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Kabupaten Bangka, Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan lainnya. Daerah-daerah tersebut mulai menyadari bahwa pelayanan manual sudah tidak efektif lagi. Karenanya siMAYA menjadi pilihan. **PS/ dbs**



MENELAN KEUNTUNGAN DARI IKAN BAKAR

Cita rasa yang lezat, serta penyajian yang menarik akan semakin menjadi daya pikat para pelanggan. Sensasi yang dikecap dari gurihnya ikan bakar mengalirkan pundi-pundi keuntungan.

Bisnis kuliner termasuk usaha yang tak kenal musim dan anti krisis. Maklum usaha jenis ini selalu dibutuhkan masyarakat setiap saat. Manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan makanan sebagai kebutuhan dasar. Kondisi ini membuka potensi bagi pegiat bisnis kuliner untuk meraup peluang besar mendapatkan keuntungan.

Para pelaku usaha yang terjun ke dalam bisnis kuliner pun semakin

semarak melihat prospeknya yang sangat menjanjikan. Tidak heran jika usaha ini sangat mudah ditemui di berbagai tempat dan sudut kota, seperti usaha jamur krispi, ayam goreng crispy, surabi, gorengan, kupat tahu, bakso, siomay, kerupuk, ikan bakar dan lain sebagainya.

Sukses berbisnis kuliner salah satunya dirasakan Sutarjo, pemilik warung ikan bakar Tarjo. Warung ikan bakar di Jalan Arteri Permata Hijau daerah Jakarta Selatan ini

selalu ramai dikunjungi para pembeli. Saban hari pemandangan yang terlihat berupa kepulan asap yang membumbung tinggi dan ratusan konsumen menyantap berbagai ikan bakar.

Warung ikan bakar Tarjo memang tidak terkesan mewah. Namun para pelanggan yang datang di sana cukup beragam, mulai kalangan bermobil sampai pejalan kaki. Sebanyak 2 sampai 4 kuintal ikan beragam jenis bisa ludes saban harinya. Keuntungan

besar pun dapat didapat lelaki asal Pacitan ini dari usaha ikan bakar.

Kesuksesan usaha ikan bakar yang kini dinikmati Sutarjo bukanlah usaha yang mudah. Butuh usaha keras yang cukup lama untuk meraihnya hingga seperti saat ini. Saat mulai merintis usaha warung makan, Tarjo selalu menyediakan menu utama yaitu ikan bakar, berbeda dari pesaingnya yang lebih banyak ikan digoreng.

Modal pengalaman dan akrab dengan masakan ikan sehingga mampu membuat bumbu ikan bakar yang nikmat dan lezat serta berciri khas di daerah asalnya. Bermodalkan alat pembakar dan kaleng bekas serta uang Rp.20.000 membuka warung ikan bakarnya. Ternyata para pembelinya menyukai racikan rasa ikan bakarnya. Dari hari ke hari pembelinya makin bertambah banyak. Dari keuntungan usahanya itu dirinya mampu membeli sebidang tanah senilai Rp.250 juta. Di atas tanah itu, ia mengembangkan usaha kedai ikan bakarnya.

Saat ini kedai usaha ikan bakar Tarjo semakin dikenal banyak orang dari berbagai kalangan. Ikan bakar dengan bumbu ndeso-nya mampu menyihir penikmat ikan bakar. Slain melayani pembeli yang datang langsung, juga melayani pesanan ikan bakar. Itu, artinya pundi-pundi keuntungan semakin banyak didapat. Dalam sebulan, Sutarjo mampu mengantongi omzet ratusan juta rupiah dari warung ikan bakarnya.

Usaha ikan bakar sebenarnya bukan aktifitas yang dipilih Sutarjo saat merantau ke ibukota. Beragam pekerjaan sudah pernah ia jalani. Namun pada akhirnya bisnis warung ikan bakar ini lah yang jadi sandaran hidupnya.

Saat pertama kali tiba di Jakarta, dirinya bekerja sebagai cleaning service. Namun karena merasa tidak betah bekerja di bidang itu dirinya mengundurkan diri setelah empat bulan bekerja. Setelah itu, Tarjo mencoba pekerjaan

sebagai pembantu rumah tangga di kawasan Sunter. Namun, setelah lima bulan bertahan dan bosan dan mencoba menjadi cleaning service lagi di sebuah perusahaan. Lagi-lagi akhirnya berhenti lagi dari pekerjaannya dan memilih menjadi kuli bangunan.

Seakan bosan menjadi pekerja, Sutarjo mencoba menjadi pedagang sayur keliling serta jualan minuman ringan. Pagi hari dirinya berdagang sayur dan siang hari jualan minuman ringan. Saat malam, dirinya juga membuka warung makan dan menjual rokok. Keberuntungan berpihak kepadanya ketika tahun 1997, bersama istri, dan seorang anaknya merintis usaha warung makan. Menu utamanya ikan bakar. Alasannya, kebanyakan orang hanya menjual ikan goreng.

Kini warung ikan bakar Tarjo sudah kesohor. Banyak kalangan atas yang sering menyambangi warung ini. Wajar jika banyak orang yang berminat bekerja sama dengannya. Beberapa orang memang sempat bekerja sama denganya untuk membuka kedai ikan bakar Tarjo. Namun, kerja sama itu distop karena suatu hal. Saat ini, selain di Jakarta, kedai ikan bakar Tarjo yang masih bertahan hanya yang berlokasi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Meski demikian, Sutarjo merasa tidak kapok bekerja sama dengan orang lain yang ingin membuka kedai ikan bakar Tarjo. Namun calon partner harus memiliki niat sungguh-sungguh untuk mengembangkan usaha. Sebab keuntungan pasti datang jika si pemilik kedai menjalankan usaha dengan sungguh-sungguh. (yn/dbb)

TIPS USAHA IKAN BAKAR

Saat memulai bisnis usaha ikan bakar dibutuhkan pengetahuan bagaimana menjalankannya dan resepnya. Ada beberapa tips tentang usaha kuliner ikan bakar yang mungkin dapat membantu Anda meraih kesuksesan saat membuka usaha ini. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. TEMPAT YANG TEPAT

Tempat yang tepat yaitu tempat yang sekiranya pas untuk usaha ini. Strategis dan kenyamanan. Pilihlah tempat yang dekat dengan keramaian atau bisa juga tempat pada pemancingan ikan. Selain itu, bisa juga memanfaatkan pinggir jalan yang sekiranya ramai orang berlalu-lalang. Sebab rata-rata orang menyukai tempat lesehan dibanding menggunakan kursi.

2. JENIS IKAN

Jenis ikan yang akan dijadikan



usaha juga sangat menentukan dalam bisnis ini. Untuk itu harus pintar memilih ikan yang akan dijadikan usaha.

3. RESEP DAN PENYAJIAN

Untuk memberikan kesan berbeda dengan usaha serupa yang ada upayakan resep atau bumbunya berbeda dengan yang lainnya. Resep yang berbeda akan menarik pelanggan untuk mencicipi. Sedangkan dalam proses penyajian dan proses membakar ikan pun harus dilakukan dengan teliti dan terlihat menarik. Sebab dengan cara penyajian yang menarik akan semakin menambah selera para pembeli. (*)

SIAGA KEBAKARAN HUTAN



Hutan sejatinya harus dilindungi agar tetap lestari. Rusaknya hutan dapat menimbulkan terjadinya bencana alam. Perusakan hutan pun memperparah pemanasan global dan perubahan iklim.

Indonesia merupakan pemilik hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia dengan luas kawasan mencapai 130,68 juta hektare. Keberadaan hutan di Indonesia sangat penting tidak hanya untuk bangsa Indonesia tetapi juga bagi semua makhluk hidup di bumi. Bahkan hutan di Indonesia sering

dijuluki sebagai paru-paru dunia.

Akan tetapi laju deforestasi hutan yang sangat cepat membuat luas hutan semakin berkurang. Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia mencapai 450 ribu hektare pertahun. Pembalakan liar, kebakaran serta perusakan hutan yang kian marak menambah

deforestasi dan degradasi hutan semakin tinggi.

Sejatinya hutan perlu dilindungi, dikonservasi, dan direboisasi oleh semua pihak. Sebab masih tingginya laju kerusakan hutan memberikan ancaman yang serius bagi masyarakat. Kerusakan hutan memiliki dampak seperti bencana



tanah longsor, kekeringan, banjir, global warming, dan rusaknya lapisan ozon serta punahnya kekayaan flora dan fauna. Untuk mengurangi kerusakan hutan sangat perlu dilakukan peningkatan kesadaran akan pentingnya hutan. Di samping itu, penindakan tegas juga harus dilakukan agar kerusakan hutan tidak meluas.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Pemerintah akan membenahi sistem pengelolaan kawasan hutan produksi tanpa

adanya praktik pengelolaan akses bebas. Kawasan hutan yang 'open access' berpotensi meningkatkan tindak pembalakan liar yang menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kebakaran hutan.

"Perlu adanya patroli, dan hindari praktik open access oleh swasta pemegang izin pengelolaan hutan," ujarnya.

Pemerintah telah siaga darurat terhadap kasus pembakaran hutan. Sebab, dari waktu ke waktu pembakaran hutan ini semakin meluas. Untuk itu, Menteri LHK menekankan kepada seluruh jajaran pemda juga dunia usaha agar mengantisipasi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan. Setiap ada titik api, tindakan pemadaman harus dilakukan secara cepat. Untuk itu, harus ada niat dan kemauan kuat untuk menangani persoalan pembakaran hutan tersebut secara bersama-sama. Selain itu melakukan tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran hutan.

Lokasi yang paling parah mendapatkan kerusakan akibat pembakaran hutan adalah Provinsi Riau, menyusul Jambi. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan siaga darurat untuk Provinsi Riau. Berdasarkan peninjauan Menteri LHK, di lapangan terhadap lokasi pembakaran hutan tersebut pada tanggal 15 dan 16 Februari terdapat enam spot utama pembakaran hutan. Pusat pembakaran hutan terjadi pada wilayah yang mudah diakses oleh siapapun (open access), di dekat perusahaan perkebunan dan ada di sekitar Hutan Tanaman Industri (HTI).

Menghadapi darurat pembakaran hutan ini, Menteri LHK akan menyelesaikan perkara ini dengan Kementerian Pertanian. Sebab, kedua kementerian ini dinilai memiliki wewenang dalam mengurus masalah pembakaran hutan.

SIAGA DARURAT

Penetapan status Siaga Darurat pencegahan dan penanganan

Karhutla untuk provinsi Riau juga diakui Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penetapan itu untuk mengantisipasi karhutla yang lebih besar. Sebab seiring dengan masuknya musim panas dan kering, beberapa titik api yang terdeteksi di Provinsi Riau juga diprediksi berpotensi meluas. Potensi tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah kabupaten/kota di Riau bermunculan.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan makin merebaknya hotspot di area di Kabupaten Bengkalis yang berpotensi meluas, maka Menteri LH dan Kehutanan telah meminta bantuan Kepala BNPB untuk dukungan langkah-langkah siaga darurat.

Sutopo mengungkapkan kebakaran hutan dan lahan di Riau selalu berulang setiap tahun. Berdasarkan data hotspot tahun 2006 hingga 2014, pola karhutla di Riau terjadi dua periode dalam setahun yaitu antara Februari hingga April dan Juni hingga Oktober.

"Modus dan motif kebakaran hutan dan lahan sudah diketahui. Begitu pula berbagai peraturan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, sudah banyak. Namun selalu saja berulang," ujarnya.

Sutopo menjelaskan ada empat bentuk dukungan yang akan dipersiapkan. Pertama, dukungan pelaksanaan hujan buatan dalam waktu dekat. Kedua, dukungan bagi masyarakat untuk pembuatan 1.000 unit sekat kanal rawa gambut di daerah-daerah sangat rawan. Ketiga, dukungan pesawat helikopter patroli, monitoring dan "water bombing" selama tiga bulan serta keempat, memberikan dukungan personil BNPB untuk posko di pusat dan daerah.

(yn/dbs)

PERISTIWA SEJARAH INDONESIA DI BULAN MARET



Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta secara besar-besaran yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat berdasarkan instruksi dari Panglima Divisi III, Kol. Bambang Sugeng. Serangan di pagi buta ini juga untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI - berarti juga Republik Indonesia - masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB dengan tujuan utama untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Soeharto pada waktu itu sebagai komandan brigade X/Wehrkreis III turut serta sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta. Tak lama setelah Serangan Umum 1 Maret, terjadi Serangan Umum Surakarta yang menjadi salah satu keberhasilan pejuang RI yang paling gemilang karena membuktikan kepada Belanda, bahwa gerilya bukan saja mampu melakukan penyerangan atau sabotase, tetapi juga mampu melakukan serangan secara frontal ke tengah kota Solo yang dipertahankan dengan pasukan *kavelerie*, persenjataan berat - artileri, pasukan infantri dan komando yang tangguh. Serangan umum Solo inilah yang *menyegel* nasib Hindia Belanda untuk selamanya.

Lahirnya Supersemar Surat Perintah Sebelas Maret atau **Surat Perintah 11 Maret** yang disingkat menjadi **Supersemar** adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, Soekarno, pada tanggal **11 Maret 1966**. Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Surat Perintah Sebelas Maret ini adalah versi yang dikeluarkan dari Markas Besar Angkatan Darat (AD) yang juga tercatat dalam buku-buku

sejarah. Sebagian kalangan sejarawan Indonesia mengatakan bahwa terdapat berbagai versi Supersemar sehingga masih ditelusuri naskah supersemar yang dikeluarkan



oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor. Berbagai usaha pernah dilakukan Arsip Nasional untuk mendapatkan kejelasan mengenai surat ini. Bahkan, Arsip Nasional telah berkali-kali meminta kepada Jendral (Purn) M. Jusuf, yang merupakan saksi terakhir hingga akhir hayatnya 8 September 2004, agar bersedia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun selalu gagal. Lembaga ini juga sempat meminta bantuan Muladi yang ketika itu menjabat Mensesneg, Jusuf Kalla, dan M. Saelan, bahkan meminta DPR untuk memanggil M. Jusuf. Sampai sekarang, usaha Arsip Nasional itu tidak pernah terwujud. Saksi kunci lainnya, adalah mantan presiden Soeharto. Namun dengan wafatnya mantan Presiden Soeharto pada 27 Januari 2008, membuat sejarah Supersemar semakin sulit untuk diungkap.



Peristiwa **Bandung Lautan Api** adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, provinsi Jawa Barat, Indonesia pada **23 Maret 1946**. Dalam waktu tujuh jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan

kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara Sekutu dan tentara NICA Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Istilah *Bandung Lautan Api* muncul pula di harian Suara Merdeka tanggal 26 Maret 1946. Seorang wartawan muda saat itu, yaitu Atje Bastaman, menyaksikan pemandangan pembakaran Bandung dari bukit Gunung Leutik di sekitar Pameungpeuk, Garut. Dari puncak itu Atje Bastaman melihat Bandung yang memerah dari Cicadas sampai dengan Cimindi. Setelah tiba di Tasikmalaya, Atje Bastaman dengan bersemangat segera menulis berita dan memberi judul *"Bandoeng Djadi Laoetan Api"*. Namun karena kurangnya ruang untuk tulisan judulnya, maka judul berita diperpendek menjadi *"Bandoeng Laoetan Api."*

INI FAKTANYA!

- Indonesia adalah negara dengan persentase tertinggi dunia, di mana penduduknya memilih menjadi lebih kreatif daripada lebih pintar. [Survei Ipsos]
- Setiap menit ada 3 penduduk Indonesia yang meninggal dunia. Di sisi lain setiap 7,36 detik satu orang bayi lahir di Indonesia.
- Danau Gunung Tujuh di Kerinci, Jambi adalah danau kaldera tertinggi di Asia Tenggara.
- Manusia tidak bisa bunuh diri dengan cara menahan nafasnya dengan sengaja.
- Memakai sabuk terlalu kencang pada perut bisa menimbulkan masalah seperti gastrointestinal, naiknya asam lambung, termasuk pula sakit perut.
- Setiap detik, ada sekitar 100 petir menyerang bumi. Tahukah Anda, sambaran kilat pada petir lebih panas 5 kali dr panas permukaan matahari.
- Latte adalah kata Italia untuk susu. Jadi jika Anda meminta latte di Italia, Anda akan diberi susu.
- Memainkan lagu 'Happy Birthday' lewat telepon, tekan 1121 63 1121 96 11#9 632 9693 63
- Rata-rata siswa SMA di Korea Selatan belajar 14-16 jam dalam sehari. Tak jarang siswa SMA Korsel bawa sikat gigi, selimut, dan bantal ke sekolah.
- Morihei Ueshiba, pendiri aikido, pernah menakluki juara dunia sumo dgn menekan lawannya sehingga tak berdaya di lantai hanya menggunakan 1 jarinya.
- Merokok tidak mengurangi stres, hanya mengurangi keresahan sementara. [BBC Indonesia]
- Memberi hadiah jam kepada orang di Korea, secara tidak langsung sama saja seperti Anda menyuruhnya menghitung sisa-sisa waktu hidupnya.
- Brad Pitt pernah mendapat hadiah dari Angelina Jolie di ultahnya, pada tahun 2011, berupa sebuah Tank T-55 eks Uni Soviet.
- Thomas Alva Edison melamar istrinya Mina Miller dengan kode Morse.

"Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tetapi ilmu bertambah apabila dibelanjakan." (Ali bin Abi Thalib)

"Nilai seseorang itu ditentukan dari keberaniannya memikul tanggung jawab, mencintai hidup, dan pekerjaannya."
(Kahlil Gibran)

EVENT & FOTO



Menko PMK Puan Maharani menghadiri Rapat Paripurna Tingkat Menteri tentang pengelolaan perbatasan dan rencana penarikan kewenangan terkait Flight Information Region (FIR), Di Kantor Kementerian Polhukam, Jakarta.



Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Haswan Yunaz dan Ketua Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Haryono Isman, memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan The 6th Tafsir World Sports for All Games 2016 di Jakarta.



Menko PMK Puan Maharani memberikan penghargaan kepada Walikoto Surabaya Tri Rismaharini dalam ajang Program Inovasi Kinerja Badan POM di Jakarta.



Menko PMK Puan Maharani menghadiri peringatan Hari Raya Tahun Baru Imlek Nasional 2015 yang diselenggarakan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) di Jakarta.



Menko PMK Puan Maharani didampingi Deputy I Willem Rapangilei meninjau kawasan banjir di Kalibata, Jakarta.



Menko PMK Puan Maharani mendengarkan paparan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yambisei di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.



Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Chazali Situmorang, tengah menjelaskan pentingnya penggunaan Nomor Identitas Tunggal (NIK) untuk mendukung implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang efektif kepada media di Jakarta.

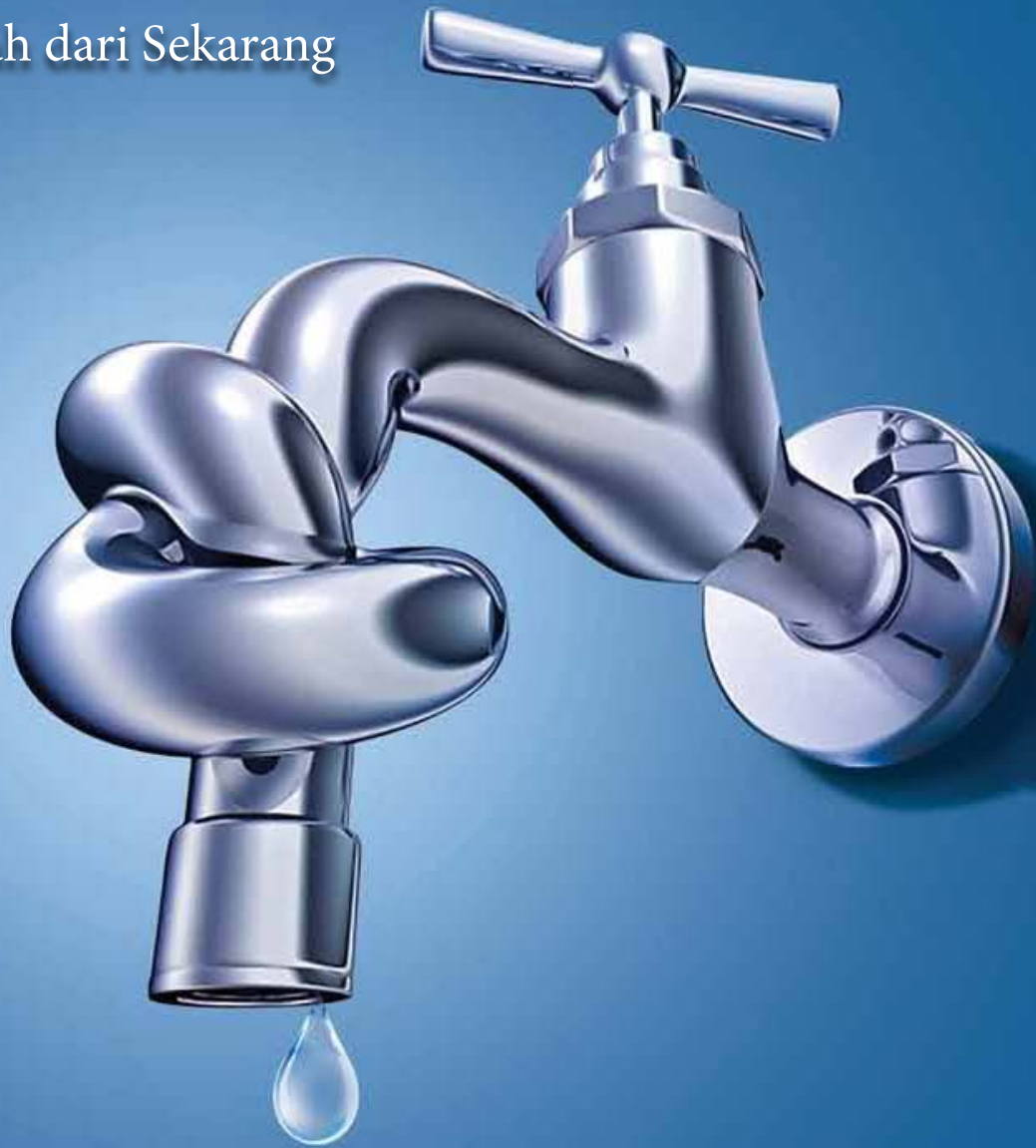


Menko PMK Puan Maharani memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri acara aplikasi pemanfaatan basis data terpadu untuk program perlindungan sosial bersama Wapres Jusuf Kalla di Jakarta.

Bumi Adalah Rumah
Bagi Anak Cucu Kita

Wariskan untuk Mereka Air Bersih

Hematlah dari Sekarang



Memperingati Hari Air Sedunia
22 Maret 2015

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN